**LAPORAN PENELITIAN**

**PERAN DAN STRATEGI KIAI DALAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI LINGKUNGAN PESANTREN**

**(Studi Kasus Pesantren di Jember)**

****

**Oleh:**

**Ibanah Suhrowardiyah Shiam Mubarokah**

**NUP:201708176**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER**

**2019**

**DAFTAR ISI**

**BAB I : PENDAHULUAN**

* 1. Latar Belakang Penelitian
	2. Rumusan Masalah
	3. Tujuan Penelitian
	4. Signifikansi Penelitian
	5. Metodologi Penelitian
	6. Kerangka Teori
	7. Kajian Pustaka

**BAB II : KIAI DAN PESANTREN DI JEMBER**

 2.1 Kiai dan Pesantren

 2.2 KH. Muhyiddin Abdusshomad dan Pondok Pesantren Nurul Islam Jember

 2.2.1 Sejarah dan Kurikulum Pondok Pesantren Nurul Islam

 2.2.3 Visi, Misi dan Tujuan Pondok Pesantren Nurul Islam

 2.3 KH. Abdul Hamid Chidlir dan Madrasah Ash-Shiddiqi Putri Jember

 2.3.1 Biografi KH. Abdul Hamid Chidlir

 2.3.2 Sejarah dan Kurikulum Madrasah Ash-Shiddiqi Putri

 2.3.3 Visi, Misi dan Tujuan Madrasah Ash-Shiddiqi Putri

 Pemimpin Masyarakat

 2.4 Kiai dan Kehidupan Sosial Masyarakat

**BAB III : GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KALANGAN PESANTREN**

 3.1 Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Islam

 3.2 Kiai dan Pemberdayaan Perempuan di Kalangan Pesantren

 3.3 KH. Muhyiddin dan Pembaharuan terhadap Perempuan di Kalangan Pesantren

 3.3.1 Kiprah KH. Muhyiddin Abdusshomad sebagai Pejuang Perempuan

 3.3.2 KH. Muhyiddin Abdusshomad dan Pemberdayaan Perempuan di Kalangan Pesantren

 3.4 KH. Abdul Hamid Chidlir dan Pemberdayaan Perempuan di Kalangan Pesantren

 3.4.1 Perempuan di mata KH. Abdul Hamid Chidlir

 3.4.2 Madrasah sebagai Sarana Mencetak “Kiai Perempuan”

**BAB IV : PENUTUP/KESIMPULAN**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**I. LATAR BELAKANG PENELITIAN**

Dalam kajian keislaman, persoalan perempuan merupakan bagian yang senantiasa diperbincangkan. Apalagi dengan terus menerusnya isu-isu perempuan dikembangkan dan diteorisasikan oleh berbagai elemen masyarakat, baik dari kalangan aktifis di LSM maupun dalam kajian akademik di berbagai perguruan tinggi. Namun demikian, di beberapa masyarakat lain, khususnya di kalangan pesantren salafi, perbincangan isu perempuan kerap hanya berpaku pada teks-teks agama yang seringkali dimaknai secara tekstual. Hal ini tentu saja menjadi berbeda dengan perjuangan gerakan perempuan untuk memberikan *bargaining power* pada perempuan agar bisa setara dengan laki-laki.

Sesungguhnya, jika menelisik pada sejarah, apa yang dilakukan para aktifis perempuan ini telah dimulai sejak masa Rasulullah.. Bahkan aktivitas perempuan pada masa awal Islam, tidak hanya di ruang domestik, tetapi juga di ranah publik. Aktifitas ini tidak hanya dilakukan oleh para istri Nabi akan tetapi juga dilakukan oleh seribu dua ratus perempuan dari beribu-ribu sahabat Rasulullah (Roded, 1995: 38). Situasi ini berubah pada masa Umar bin Khattab (634-644 M), di mana perempuan mulai terpinggirkan dengan keputusan-keputusan Umar yang berkaitan dengan kaum perempuan. Umar mengeluarkan kebijakan bahwa perempuan harus berada di dalam rumah dan melarang mereka untuk beraktivitas di luar rumah, meskipun untuk pergi ke masjid. Dikatakan juga bahwa para istri Rasulullah dilarang untuk melakukan ibadah haji.

Terpuruknya kondisi perempuan tidak berlangsung lama, karena di masa Utsman bin Affan (644-656 M), istri-istri Rasulullah kembali diizinkan untuk melakukan ibadah haji dan para perempuan diperbolehkan kembali pergi ke masjid bersama-sama dengan lelaki meskipun mereka diletakkan di tempat tersendiri di belakang lelaki. Selanjutnya pada masa dinasti Abasiyah, kaum perempuan kembali mengalami kemunduran. Mereka tidak lagi dapat beraktivas di luar rumah, tidak ikut dalam peperangan, bahkan kaum perempuan sama sekali tidak dapat berperan dalam kehidupan budaya dan masyarakat (Leila, 1992: 61). Kondisi ini berubah kembali pada akhir abad ke-18 di mana perempuan dapat bersekolah dan boleh hadir dalam *kuttab*, yaitu adanya proses belajar membaca dan menulis al-Qur'an yang dilaksanakan di dalam masjid yang sebelumnya hanya dihadiri oleh kaum lelaki. (*ibid,* 113).

Dalam konteks ke-Indonesiaan, Islam berkembang sejalan dengan budaya yang telah ada. Para penyebar Islam, seperti wali songo mengenalkan Islam dengan cara damai melalui media budaya. Cara ini memberi dampak positif pada pesatnya pemeluk agama Islam di Nusantara. Perjuangan ini diteruskan oleh ulama dan kiai melalui berbagai media. Salah satu media yang paling banyak digunakan untuk dakwah Islamiyah adalah dengan membangun pesantren, membangun lembaga pendidikan formal, membentuk kelompok pengajian di surau dan masjid, membentuk organisasi keislaman, serta berbagai media lainnya. Proses ini menjadi bagian dari pembentukan tata nilai dan tradisi di kalangan jama'ah kiai dan lingkungan sekitar pesantren.

Kiai sebagai kepanjangan tangan dari para wali songo ini memiliki pengaruh yang cukup kuat di lingkungannya. Ada tiga faktor yang mendukung posisi kuat kiai, yaitu pengetahuan, tingkat ekonomi, dan kewibawaan. Kiai dianggap sebagai orang yang memiliki pengetahuan lebih dibandingkan dengan masyarakat sekitarnya. Karena itu, kiai menjadi tokoh rujukan dari berbagai persoalan sosial dan keagamaan. Selain itu, keilmuan yang dimiliki kiai menjadikannya selalu mempunyai pengikut, baik para pendengar informal yang senantiasa menghadiri pengajian atau ceramahnya maupun para santri yang tinggal di pondok sekitar rumahnya. Kiai biasanya berasal dari keluarga terpandang. Beberapa kiai berasal dari keluarga dengan ekonomi di atas rata-rata, meskipun tidak dipungkiri banyak juga kiai yang memiliki keterbatasan ekonomi. Namun secara umum kiai berasal dari keluarga kaya sehingga kiai ditempatkan sebagai tokoh elite dalam masyarakat Jawa (Turmudi, 2003: 93). Selain itu, kiai senantiasa menjaga prilaku dan sikapnya di tengah masyarakat. Sikap tawadhu', wara', dan sopan inilah yang menjadi bagian dari wibawa kiai yang mampu menganggat derajatnya di mata masyarakat.

Pengaruh kiai yang sangat kuat di masyarakat ini menjadi bagian yang menguntungkan atau justru merugikan bagi perjuangan isu-isu perempuan. Hal ni sangat tergantung pada perspektif sang kiai dalam memaknai ajaran Islam dan dalam menginternalisasikannya dalam konteks sosial budaya. Kiranya, hal ini telah dicontohkan dalam sejarah Islam di mana perempuan berada dalam posisi terpuruk dan maju, sangat tergantung pada siapa yang memiliki *power* lebih. Karena itulah, indoktrinasi kiai ini perlu dikaji secara mendalam, apakah memberi aura positif terhadap posisi perempuan? Atau justru menjadikan perempuan sub ordinat dan tidak memiliki *bargaining power?* Atau bahkan kiai menempatkan perempuan sebagai entitas yang harus maju sehingga dilakukan upaya-upaya pemberdayaan? Jika memang demikian, maka apa saja strategi yang digunakan kiai untuk melakukan pemberdayaan pada perempuan? Dalam bentuk apa saja pemberdayaan itu diberikan? Dan bagaimana penerimaan perempuan atas upaya tersebut? Serta apa implikasinya terhadap relasi perempuan dengan laki-laki baik di ranah publik maupun di ranah domestik?. Berbagai pertanyaan tersebut menjadi bagian penting dari kajian ini untuk mengetahui apakah Kiai memberi ruang yang setara sebagaimana Islam melalui Rasulullah memberikan banyak *uswah hasanah* dalam memandang dan memperlakukan perempuan. Dengan latar belakang tersebut, maka penelitian tentang Peran dan Strategi Kiai dalam Peningkatan Pemberdayaan Perempuan di Pesantren, Studi Kasus Pesantren di Jember dilakukan.

**II. RUMUSAN MASALAH**

Untuk menjamin kualitas penelitian, maka diperlukan beberapa pertanyaan penelitian yang akan memandu dalam penelitian ini. Pertanyaan penelitian ini terbagi dalam Pertanyaan Utama dan Pertanyaan Turunan sebagaimana berikut:

**Pertanyaan Utama**

Bagaimana peran kiai di Jember dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan di lingkungan pesantren?

**Pertanyaan Turunan**

1. Bagaimana posisi sosial kiai di lingkungan pesnatren dan sejauh mana memberi pengaruh terhadap berbagai isu sosial yang muncul?
2. Apa saja peran kiai yang memberi dampak pemberdayaan dan peningkatan *bargaining power* perempuan dan dalam bentuk apa saja pemberdayaan dan peningkatan *bargaining power* pada perempuan yang telah dilakukan oleh kiai?
3. Apa strategi yang digunakan agar upaya pemberdayaan dan peningkatan *bargaining power* pada perempuan berhasil?
4. Apa saja implikasi peran kiai terhadap kehidupan sosial perempuan di ranah domestik dan ranah publik?

**III. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menggambarkan peran dan relasi sosial kiai dengan lingkungannya, baik di dalam pesantren maupun di luar pesantren
2. Mendeskripsikan upaya-upaya yang sudah dilakukan kiai untuk pemberdayaan dan peningkatan *bargaining pwer* pada perempuan
3. Menjelaskan strategi, kendala, dan *problem solving* dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan *bargaining power* pada perempuan
4. Menggambarkan implikasi peran kiai terhadap keberdayaan perempuan dan pengaruhnya terhadap relasi sosial perempuan.

**IV. SIGNIFIKANSI PENELITIAN**

Signifikansi penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah bahan rujukan dan informasi bagi berbagai kajian dan penelitian tentang kiai dan perempuan.
2. Sebagai panduan dan contoh bagi para kiai atau tokoh masyarakat lain dalam pemberdayaan dan peningkatan *bargaining power* perempuan
3. Sebagai panduan bagi perempuan dalam memperjuangkan hak-hak dasar perempuan yang sesungguhnya menjadi bagian dari ajaran Islam

**V. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam (*indepth interview)*, dan observasi. Informan utama penelitian ini adalah 2 orang kiai yang berdomisili di Jember, memiliki pesantren dan atau santri/siswa berjenis kelamin perempuan. Beliau berdua adalah KH. Muhyiddin Abdusshomad dan KH. Drs. Abdul Hamid Chidlir. Pemilihan KH. Muhyiddin Abdusshomad sebagai salah satu responden adalah karena beliau merupakan salah satu sosok kiai yang dikenal aktif dalam ”dunia perempuan”. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan kepada beliau untuk dapat mengetahui lebih dalam tentang posisi dan peran beliau dalam usaha meningkatkan pemberdayaan dan peningkatan *bargaining power* pada perempuan.

Sedangkan pemilihan KH. Drs. Abdul Hamid Chidlir adalah atas dasar posisi beliau sebagai pemimpin sebuah Madrasah dengan keseluruhan siswa berjenis kelamin perempuan. Di wilayah Jember tidak banyak ditemukan sebuah pesantren dan atau madrasah yang mengkhususkan para santri dan pelajarnya adalah perempuan. Oleh karena itu, penelitian ini akan berusaha melacak secara mendalam apakah dengan adanya para siswi yang keseluruhannya perempuan akan dapat memudahkan atau bahkan lebih mempersulit untuk menerapkan pemberdayaan terhadap perempuan dan juga peningkatan *bargaining power* pada perempuan, khususnya di kalangan pesantren.

Metode observasi akan dilakukan dalam proses penelitian, baik pada saat wawancara maupun pada prose pembelajaran di pesantren dan di luar pesantren. Sedangkan data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berbagai sumber dan referensi yang relevan dengan kajian ini. Sumber-sumber ini antara lain berupa buku-buku, kitab-kitab, artikel, jurnal-jurnal dan surat kabar yang berkaitan dengan topik penelitian.

Dalam perjalanan penelitian ini, dirasakan adanya ketidakseimbangan perolehan informasi dalam mendalami dan mempelajari pemikiran di antara KH. Muhyiddin Abdusshomad dan KH. Drs. Abdul Hamid Chidlir. Hal ini dikarenakan kesibukan KH. Muhyiddin Abdusshomad sehingga kurangnya pertemuan yang dilakukan. Juga dikarenakan komunikasi email seperti yang beliau sarankan tidak berjalan dikarenakan tidak adanya balasan email dari beliau. Demikian juga dalam proses observasi yang dirasa kurang maksimal. Berbeda dengan KH. Drs. Abdul Hamid Chidlir yang selama penelitian ini dilaksanakan dapat memberikan kerja sama yang memuaskan. Hal ini juga dikarenakan adanya ikatan persaudaraan di antara peneliti dan KH. Abdul Hamid Chidlir. Oleh karena itu, diakui bahwa hasil dari penelitian ini memang tidak seimbang di antara kedua responden yang ada.

Penelitian ini akan dianalisa dengan menggunakan analisis isi feminis (*feminist content analysis)*, yaitu metode yang secara tipikal mengkaji produk-produk kultural melalui lensa teori feminis (Munti, 2005). Hal ini penting mengingat fokus penelitian ini pada peran kiai terhadap perempuan sehingga perempuan seakan-akan berada pada posis sebagai obyek pemberdayaan. Dengan analisa perspektif feminis akan memberikan hasil yang lebih berpihak pada penegakan hak asasi manusia, khususnya hak asasi perempuan.

**VI. KERANGKA TEORI**

Berbagai teori feminis telah memberikan banyak inspirasi terhadap perempuan Indonesia dalam memperjuangkan hak-haknya. Setidaknya, saat melakukan kajian terhadap perempuan, hal mendasar yang harus dilihat adalah apakah perempuan tidak diperlakukan secara subordinatif, tidak mengalami kekerasan, diskriminasi, beban ganda (*double burdon)*, dan marginalisasi (Faqih, 1996). Lima bentuk ketidakadilan ini menjadi kunci penting untuk melihat situasi dan kondisi perempuan.

Selain itu, dalam pemberdayaan perempuan, setidaknya ada lima tingkat yang dapat digunakan untuk melihat seorang perempuan telah berdaya atau tidak. Pada tingkatan terendah, perempuan sejahtera dan tercukupi kebutuhan dasarnya, akan tetapi belum memiliki akses pada berbagai sumber daya yang dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Jika perempuan telah memiliki akses, maka penting melihat apakah ia telah memiliki kesadaran terhadap hak-hak dirinya. Sementara itu, ketika perempuan telah sampai pada tingkat kesadaran, maka sejauh mana ia berpatisipasi dalam pengambilan keputusan. Dan level tertinggi dalam melakukan pemberdayaan perempuan adalah pada saat perempuan telah memiliki kontrol terhadap berbagai kehidupannya. Tahap inilah yang disebut oleh Longwe (1991) sebagai perempuan berdaya dan upaya pemberdayaan dianggap berhasil.

Demikian juga dalam analisa penelitian ini akan mengkaji sampai dimana Kiai memberikan pemberdayaan kepada perempuan. Hal ini perlu dianalisa karena tidak jarang orang menganggap seseorang disebut berdaya jika telah memiliki sandang, pangan, dan papan untuk memenuhi kehidupannya. Padahal posisi ini menurut Longwe berada di level paling rendah.

**VII. KAJIAN PUSTAKA**

Berbagai kajian yang dilakukan oleh para ahli ilmu sosial yang menempatkan kiai sebagai faktor yang menentukan terhadap kehidupan masyarakat telah banyak dilakukan. Misalnya tulisan Ali Haidar yang membahas aspek fiqh sebagai dasar pemahaman kiai. Ali Haidar telah mengkaji NU yang dipimpin oleh para kiai dari sisi fiqh politik. Ia menyimpulkan bahwa rujukan kiai dalam berpolitik adalah tradisi keilmuan menurut faham *ahlus sunnah wal jama’ah.* Faham ini terdiri dari tiga aspek pokok, yaitu aspek keimanan, aspek hukum amaliyah, dan aspek etika. Akan tetapi, menurut Ali Haidar para kiai lebih menfokuskan dan mengkonsentrasikan diri kepada aspek fiqh daripada aspek-aspek lainnya. Terhadap aspek akidah, hampir tidak ditemukan kajian-kajian yang serius dan berkesinambungan (Ali Haidar 1994). Selain itu, Zamakhsyari Dhofier telah melakukan kajian terhadap kiai dari sudut tradisi keilmuan dan hubungannya dengan kekerabatan serta kepemimpinan kiai di Jawa dan seluruh nusantara. Dhofier memusatkan studinya pada kiai dan pesantren, atau yang ia sebut sebagai “tradisi pesantren”. Ia mengemukakan bahwa ada jaringan yang kuat antara kiai, santri, dan para alumni melalui pendidikan tradisional. Hubungan tersebut berimplikasi terhadap peran kuat kiai pesantren di masyarakat (Dhofier 1982).

Sedangkan Imron Arifin (1992) meneliti kepemimpinan kiai di pesantren Tebuireng Jombang Jawa Timur. Berdasarkan penelitiannya, Imron sampai pada kesimpulan bahwa terjadi pergeseran pola dan gaya kepemimpinan kiai, yaitu dari pola *individual-sentris* ke pola *kolektif-partisipatif-rasional* yang lebih egalitarian. Hal ini terjadi karena kapasitas kiai dalam menguasai kitab-kitab kuning mengalami kemerosotan. Akan tetapi, perubahan pola dan gaya kepemimpinan tersebut hanya berlangsung di kalangan kiai, sedangkan di kalangan komunitas pesantren secara umum masih kuat memegang nilai-nilai ideal tentang kepemimpinan kiai.

Studi menarik tentang Islam terutama mengenai kiai Jawa juga dilakukan oleh Geertz pada tahun 1960an. Studi ini menarik perhatian, baik sarjana Indonesia maupun sarjana Barat yang tertarik dengan perkembangan Islam di Indonesia. Studi ini sangat signifikan karena ia telah meletakkan kerangka untuk memahami pengaruh politik kiai Jawa. Studi Geertz juga menjelaskan masalah-masalah politik Indonesia secara umum. Kendati demikian, studinya banyak dikritik oleh beberapa sarjana (Pranowo, 1991). Salah satu kritik yang dikatakan oleh Woodward (1989) mengatakan bahwa Geertz telah gagal dalam memahami sifat-sifat perkembangan Islam di Jawa. Sedangkan Hodgson (1974) melihat Geertz gagal karena ia terlalu dipengaruhi oleh perspektif muslim modernis. Namun demikian, terlepas dari kritik ini, Geertz telah mempelopori studi-studi Islam Jawa modern.

Selain itu, seorang antropolog perempuan dari Jepang, Hiroko Horikoshi mengkaji kemampuan seorang kiai dari Cipari, Garut Jawa Barat, dari sisi kemampuannya sebagai *agen* pada masa sulit akibat pemberontakan DI / TII (Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia). Ia menyatakan bahwa peranan kiai tidak sekedar filter, tapi mereka mampu memelopori perubahan yang emansipatif dalam menghadapi arus modernisasi dengan pandangan tradisionalnya. Adapun Dr. Endang Turmudi (2003) dalam bukunya Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan membahas tentang dunia kiai dan pesantren yang membidik hubungan antara kiai dengan situasi sosial dan politik yang lebih luas. Ada tiga jenis kiai yang dibahas dalam studi ini, yakni kiai pesantren, kiai tarekat, dan kiai yang terlibat dalam politik. Dua aspek kepemimpinan kiai juga disoroti.

Sementara itu, Bisri Effendi mengkaji peran dan kepemimpinan kiai di Madura dalam usaha transformasi sosial di wilayahnya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Mansur Noor. Dalam hal ini, Mansur Noor berkesimpulan bahwa para kiai adalah elit keagamaan dan mempunyai peran kuat dalam membangun masyarakat yang religius. Mereka menggunakan pola transmisi nilai melalui pendidikan pesantren yang memiliki dampak pada pengakuan masyarakat atas kepemimpinan para kiai. Pondok dan sistem madrasah yang sudah dikembangkan dipandang oleh masyarakat sebagai lembaga pendidikan alternatif.

Studi tentang kiai yang menarik juga dilakukan oleh Dirdjosanjoto. Dia meneliti tentang peran dan efektivitas kepemimpinan kiai pesantren dan kiai langgar pada tahun 1988-1989. ia membahas peranan kiai dalam perubahan sosial dan politik di daerah pedesaan di kawasan Tayu, Pati Jawa Tengah. Persoalan pokok yang disoroti Dijdjosanjoto adalah tentang respon para kiai sebagai pemimpin agama terhadap berbagai perubahan sosial, ekonomi dan politik yang terjadi di sekeliling mereka. Penelitian ini berkesimpulan bahwa para kiai mampu bertahan dalam situasi yang cukup kompleks. Kemampuan para kiai untuk bertahan tersebut tidak hanya didukung oleh kuatnya tradisi yang telah mapan di lingkungan pesantren, namun juga sejak semula kiai berada dalam posisi mendua. Mereka adalah tokoh agama dan tokoh politik. Peran ganda ini telah mereka mainkan dengan baik sejak dulu sehingga sekarang.

Penelitian-penelitian di atas membahas permasalahan kiai dengan dikaitkan pada permasalahan sosial, budaya dan politik. Sedangkan penelitian yang membahas tentang kiai dan perempuan dapat ditemukan antara lain tulisan dari Iklilah Muzayyanah Dini Fajriah. Dia membahas tentang konsep *ijbar* dalam Islam, yaitu hak menikahkan anak perempuan oleh walinya, di mana penelitian yang dilakukan oleh Iklilah adalah kepada para wali atau ayah yang merupakan seorang kiai di wilayah Jawa Timur. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Iklilah, penelitian ini adalah juga menghubungkan kiai dengan permasalahan perempuan, tapi khususnya mengenai peningkatan pemberdayaan perempuan di kalangan pesantren. Hal ini sangat penting dan diperlukan karena pada kenyataan yang terjadi, peran kiai sangatlah besar dalam pembentukan pola pikir dan pengetahuan santri yang disuhnya. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat diketahui sejauh mana peran dan strategi para kiai dalam usaha pemberdayaan perempuan dan diharapkan dapat menjadi contoh dan tauladan bagi masyarakat umum.

**BAB II**

**KIAI DAN PESANTREN DI JEMBER**

Dalam ruang lingkup penelitian keagamaan di Indonesia, pembahasan mengenai kiai dan pesantren seakan tidak pernah berakhir. Hal ini menunjukkan bahwa kiai dan pesantren memiliki daya tarik tersendiri yang dapat menarik para peneliti untuk senantiasa menjadikan kiai dan pesantren sebagai bahan penelitian. Hal ini juga menunjukkan bahwa kiai adan pesantren mempunyai andil yang cukup besar dalam menanamkan sistem nilai Islam dalam masyarakat di sekitarnya. Dalam sejarah perjalannya, kiai dan pesantren juga mengalami pelbagai fenomena yang kemudian memunculkan banyak sisi yang dapat dibidik oleh para peneliti. Di antaranya adalah kiai dan pesantren dalam kaitannya dengan isu-isu perjuangan perempuan di Jember.

Dalam bab ini akan dibahas mengenai kiai secara umum dan juga profil 2 kiai di Jember yang akan dijadikan sebagai nara sumber utama. Hal ini perlu dilakukan untuk menunjukkan deskripsi kiai yang jelas, khususnya yang berkaitan dengan pengaruhnya terhadap isu-isu perjuangan perempuan di lingkungannya. Selain itu, gambaran tentang pesantren juga akan digambarkan dengan terperinci untuk dapat diketahui kondisi sosial yang berada di sekitar kiai dan menunjukkan bagaimana pesantren berperan penting dalam pembangunan pemahaman umat Islam di Jember khususnya yang berkaitan dengan isu perempuan.

**2.1 Kiai dan Pesantren**

Di berbagai daerah di Indonesia penggunaan istilah kiai berbeda dengan istilah ulama. Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, kiai bagi pemahaman Jawa adalah sebutan untuk “yang dituakan maupun dihormati” baik berupa orang ataupun barang. Adapun nyai adalah untuk penyebutan perempuan. Kiai bisa juga digunakan untuk menyebut ulama atau tokoh dan pusaka. Sedangkan kiai bagi masyarakat Banjar adalah gelar bagi kepala distrik (di Jawa disebut *wedana*), bukan ulama. Gelar ini berasal dari nama jabatan menteri pada kerajaan Banjar. Pemerintah Hindia Belanda kemudian mengalihkan nama ini untuk nama jabatan kepala distrik untuk wilayah Kalimantan. Contohnya adalah Kiai Masdulhak, seorang kiai yang meninggal pada pemberontakan Hariang, Banua Lawas Tabalong pada 1937[[1]](#footnote-1).

Istilah kiai dalam bahasa Jawa digunakan untuk merujuk kepada 3 hal yaitu, *pertama* kiai digunakan sebagai gelar kehormatan bagi benda-benda yang dianggap keramat, misalnya Kiai Garuda Kencana untuk gelar bagi salah satu kereta kuda milik kraton Yogyakarta. *Kedua*, sebagai gelar kehormatan untuk orang tua pada umumnya. Dan *ketiga*, sebagai gelar yang diberikan masyarakat bagi ahli agama Islam (ulama) yang memiliki atau memimpin pesantren yang mengajarkan kitab-kitab klasik kepada santrinya (Dhofier, 1982: 55).

Dalam al-Qur’an, kata ulama disebutkan sebanyak dua kali, yaitu *pertama* dalam konteks ajakan al-Qur’an untuk memerhatikan turunnya hujan dari langit, beraneka ragamnya buah-buahan, gunung, binatang, manusia, yang diakhiri dengan ayat: *Sesungguhnya yang takut kepada Allah diantara hamba-hambaNya adalah para ulama* (QS. Fathir [35]: 28). Ayat ini menggambarkan bahwa yang dinamakan ulama adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan terhadap ayat-ayat Allah yang bersifat kealaman *(kauniyyah). Kedua,* dalam konteks pembicaraan al-Qur’an yang kebenaran kandungannya telah diakui oleh ulama Bani Israil (QS. Asy-Syu’ara [26]: 197). Sedangkan dalam hadith Nabi dikatakan bahwa: Sesungguhnya para ulama di bumi seperti bintang di langit yang menerangi umat dalam kegelapan, baik di daratan maupun di lautan (HR. az-Zuhri dari Anas). Dalam hadith lain disebutkan bahwa para ulama adalah pewaris para nabi.

Quraish Shihab (1991: 385) menyebutkan bahwa ada 4 tugas utama yang harus dijalankan oleh para kiai dalam kapasitasnya sebagai pewaris para Nabi, yaitu *pertama,* menyampaikan (*tabligh*) ajaran-ajaranNya, sebagaimana perintah Allah: *Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu* (QS. Al-Maidah [5]: 67). *Kedua*, menjelaskan ajaran-ajaranNya berdasarkan ayat: *Dan Kami turunkan al-Qur’an kepadamu untuk kamu jelaskan kepada manusia* (QS. An-Nahl [16]: 44). *Ketiga*, memutuskan perkara atau problem yang berlaku dalam masyarakat, berdasarkan ayat: *Dan Allah turunkan bersama mereka al-Kitab dengan benar, agar dapat memutuskan perkara yang diperselisihkan oleh manusia* (QS. Al-Baqarah [2]: 213). Dan *keempat,* memberikan contoh pengamalan, sesuai dengan hadith yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah r.a yang menyatakan bahwa perilaku Nabi adalah praktik dari al-Qur’an.

Dengan demikian, seorang kiai adalah pencinta ilmu-ilmu agama yang didapatkan mengerjakan ibadah secara sempurna, menurut pandangan ini, adalah upaya menuntut ilmu agama secara terus-menerus dan kemudian mengajarkannya kepada para santri dan masyarakat. Dalam konteks inilah terdapat seorang kiai yang dengan berjerih payah mengajar seorang santri selama berjam-jam dalam sehari. Bahkan ada juga kiai yang mengajar sedikit santri selama bertahun-tahun lamanya. Meskipun demikian, tugas mengajar tetap dilakukannya dengan penuh kegembiraan karena ia yakin bahwa dengan cara seperti itulah ia telah melakukan pendalaman pengetahuan agama (Wahid, 1978: 124).

Selanjutnya, Horikoshi (1976) dan Mansurnoor (1990) membedakan kiai dari ulama dalam peran dan pengaruhnya di masyarakat. Ulama adalah istilah yang lebih umum dan merujuk kepada seorang muslim yang berpengetahuan. Kaum ulama adalah kelompok yang secara jelas mempunyai fungsi dan peran sosial sebagai cendekiawan penjaga tradisi yang dianggap sebagai dasar identitas primordial individu dan masyarakat (Gilsenen, 1973: 67). Dengan kata lain, fungsi ulama yang terpenting adalah peran ortodoks dan tradisional mereka sebagai pen\*egak keimanan dengan cara mengajarkan doktrin-doktrin keagamaan dan memelihara amalan-amalan keagamaan ortodoks di kalangan umat Islam (Horikoshi, 1976: 232). Istilah ulama secara luas digunakan di dunia Islam dan paling tidak, setiap muslim tahu apa arti istilah itu. Di Indonesia, beberapa istilah lokal digunakan untuk menunjukkan berbagai tingkat keulamaan; dan istilah yang paling sering digunakan untuk merujuk tingkat keulamaan yang lebih tinggi adalah kiai (Turmudi, 2003: 29). Namun demikian, di beberapa wilayah di Indonesia, ada juga yang membedakan ulama dan kiai dari segi adanya pesantren atau tidaknya seseorang itu. Seseorang yang ‘alim keagamaannya namun tidak memimpin sebuah pesantren akan dilabelkan sebagai seorang ulama dan bukan kiai. Dan seseorang yang memimpin sebuah pesantren akan dijuluki sebagai seorang kiai sekaligus sebagai seorang ulama. Adapun di Jember, secara umum istilah kiai akan merujuk kepada ulama yang memimpin pesantren, meskipun ada beberapa nama yang digelar seorang kiai meskipun tidak memimpin sebuah pesantren.

Dari diskriptif di atas, dapat difahami bahwa pola hierarki keulamaan pada umumnya ditopang dan dilembagakan oleh kenyataan bahwa keulamaan, khususnya kekiaian, pada dasarnya bersifat askriptif. Oleh karena itu, derajat kekiaian ditentukan dan diwariskan secara genealogis. Namun demikian, pengakuan masyarakat memiliki peran yang lebih menentukan berkaitan dengan keulamaan seseorang daripada sekedar faktor genealogis. Seorang muslim terpelajar yang ingin menjalankan pesantren tetapi tidak berasal dari keluarga kiai biasanya akan sulit memperoleh pengakuan dari masyarakat. Namun hal ini bukan bererti bahwa seseorang yang tidak berasal dari keluarga kiai tidak bisa menjadi seorang kiai terkenal (*ibid*, 30). Termasuk juga di daerah Jember, meskipun banyak diwarnai oleh kebudayaan Madura, namun dalam pelabelan kiai seseorang tidak murni berdasarkan faktor genealogis. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa nama kiai yang bukan dari keturunan kiai.

Bagi umat Islam, kiai tidak saja dinilai sebagai pemimpin informal yang mempunyai otoritas sentral, tetapi juga sebagai personifikasi penerus Nabi Muhammad SAW. Predikat kekiaian diberikan oleh masyarakat atas dasar keunggulan yang dimilikinya, misalnya kedalaman ilmu, keturunan, dan kekayaan ekonomi. Keunggulan tersebut digunakan oleh mereka untuk mengabdi kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, para kiai selalu menyatu dengan lingkungan dan masyarakatnya, termasuk lingkungan bangsa dan negara (Ziemek, 1986: 192). Kedudukan itu tentunya memungkinkan kiai mempunyai peranan yang signifikan dalam masyarakat yang menjadi pengikutnya, baik dibidang keagamaan maupun dibidang politik, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan. Dengan demikian, predikat kiai selalu berhubungan dengan suatu gelar yang menekankan pemuliaan dan pengakuan yang diberikan masyarakat secara suka rela kepada ulama Islam yang dipercaya memiliki peran yang dituntut oleh masyarakat, yaitu mengajak masyarakat untuk memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam dengan baik.

Pola kekiaian di Jawa termasuk di Jember juga tampak lebih terbuka, dalam arti ia dibentuk dalam pola yang lebih beroriantasi pada prestasi, bukan semata-mata karena faktor keturunan. Meskipun beberapa kiai terkenal di daerah-daerah ini berasal dari keluarga kiai, namun kekiaian yang dilekatkan pada dirinya tidak semata-mata melekat dalam struktur sosial yang ada. Pengangkatan kiai di daerah-daerah ini lebih didasarkan pada pengakuan sosial. Sepanjang seseorang mempunyai pengetahuan Islam yang luas, mempunyai kegiatan membimbing masyarakat dalam mendalami ajaran agama Islam, menjadi tauladan dan panutan, maka anggota masyarakat akan dengan mudah menjulukinya sebagai seorang kiai. Peran kiai dalam membimbing masyarakat biasanya dilakukan dalam pesantren yang diasuhnya. Pesantren merupakan sebuah wadah penting terkait dengan kekiaian seseorang. Melalui pesantren, seorang kiai dapat berinteraksi dan menyampaikan ajaran-ajarannya baik terhadap para santrinya, para orang tua santri, dan juga anggota masyarakat yang berada disekitarnya.

Menurut istilah, ”pesantren” diambil dari kata ”santri” mendapat penambahan ”pe” di depan dan ”an” di akhir, yang dalam bahasa Indonesia berarti tempat tinggal santri, tempat di mana para pelajar mengikuti pelajaran agama. Sedangkan istilah ”santri” diambil dari kata *”shastri”* (castri=India), dalam bahasa Sansekerta bermakna orang yang mengetahui Kitab Suci Hindu.[[2]](#footnote-2) Kata *shastri* berasal dari kata *shastra* yang berarti buku-buku suci, buku-buku agama atau buku tentang ilmu pengetahuan (M. Chatuverdi dan Tiwari B.N. 1970: 627). Namun demikian, setelah kedatangan Islam ke Indonesia, tujuan lembaga ini diubah dari tujuan semula, yakni tempat belajar agama Hindu menjadi tempat mempelajari agama Islam (Hasbi Amiruddin 1994: 43). Sedangkan istilah pesantren menurut Dhofier (1982: 18) berasal dari kata santri yang berarti murid. Orang Jawa biasanya menambahkan awalan pe dan akhiran an untuk menunjukkan tempat di mana sesuatu berada. Jadi, pesantren adalah tempat dimana para santri tinggal.

Di Indonesia, pesantren pertama kali berdiri pada tahun 225 H/ 840 M di Aceh, yakni mulai berdiri sejak Islam datang pertama kali di daerah ini. Namun di daerah Aceh, istilah untuk menyebut pesantren adalah *dayah.* Menurut Ali Hasjmy (1975: 7-9)[[3]](#footnote-3), Sultan Kerajaan Peureulak mendirikan lembaga pendidikan Islam yang gurunya didatangkan dari Arab, Persia, dan Gujarat. Adapun dayah yang mula-mula didirikan adalah Dayah Cot Kala yang dipimpin oleh Tgk. Chik Cot Kala. Adapun di Padang, yaitu di daerah Ulakan Pariaman, pesantren yang dalam bahasa mereka disebut dengan istilah *surau* pertama kali didirikan oleh Syaikh Burhanuddin setelah beliau kembali dari belajar di Aceh kepada Syaikh Abdur Rauf al-Singkeli. Sedangkan di Jawa, pesantren didirikan oleh Raden Fattah pada tahun 1475 M di hutan Glagah Arum di sebelah selatan Jepara. Pesantren ini mendapat kemajuan yang pesat, sehingga Glagah Arum yang merupakan kampung kecil juga turut maju dan akhirnya berubah menjadi kota kabupaten, yakni Bintara dan Raden Fattah sebagai bupatinya[[4]](#footnote-4) (Mahmud Yunus 1996: 217).

Pesantren merupakan sebuah tempat atau wadah untuk mempelajari dan mendalami ajaran-ajaran agama Islam yang biasanya dipimpin oleh seorang atau beberapa orang kiai. Pesantren paling tidak memiliki tiga unsur pendukungnya, yaitu *pertama* kiai sebagai pemimpin sekaligus pengajar yang bertanggung jawab atas berjalannya pesantren dengan baik. *Kedua,* santri atau murid, yaitu para pelajar yang menimba ilmu dalam pesantren dan biasanya mereka bertempat tinggal di dalam pesantren yang disediakan oleh kiai. Santri adalah sumber daya manusia yang tidak saja mendukung keberadaan pesantren, tetapi juga menopang pengaruh kiai dalam masyarakat. Dan *ketiga* adalah pondok, yaitu tempat tinggal yang disediakan oleh pihak kiai untuk para santrinya. Pondok biasanya berbentuk sederhana dan terdiri dari beberapa santri pada setiap kamarnya. Istilah pondok dan pesantren biasanya digunakan untuk menunjuk hal yang sama. Istilah pondok pesantren juga sering digunakan. Istilah pondok berasal dari bahasa Arab, yaitu *funduq* yang berarti asrama. Beberapa penulis lain ada yang menyatakan bahwa unsur pesantren selain yang tiga hal di atas juga adanya masjid dan kitab-kitab yang diajarkan.[[5]](#footnote-5) Ringkasnya, pesantren adalah model ”desa kecil” yang di dalamnya ada seperangkat aturan yang harus dipatuhi oleh segenap penghuninya. Karena aturan-aturan tersebut telah mengakar, terkadang tidak ditulis, namun menjadi ”hukum hidup” (living law) yang tidak boleh dilanggar sama sekali. Sang pemimpin (kiai) biasanya memimpin pesantren dengan segenap kemampuannya dan menetap di dalam ”desa kecil” itu (Kamaruzzaman-Ahmad, 2002: 69).

Pesantren di Indonesia telah menjadi pusat pembelajaran dan dakwah. Ia telah memainkan peran penting karena merupakan sistem pembelajaran dan pendidikan tertua di Indonesia. Sebelum sistem pendidikan modern diperkenalkan oleh Belanda, pesantren adalah satu-satunya sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Bahkan sampai sekarang, pesantren di Indonesia masih memainkan perannya sebagai sebuah pusat pembelajaran, meskipun harus bersaing dengan lembaga-lembaga pendidikan modern. Nurcholis Madjid mengatakan bahwa Pesantren adalah lembaga pendidikan indigenous. Sebagai lembaga indigenous, pesantren muncul dan berkembang dari pengalaman sosiologis masyarakat lingkungannya. Artinya, pesantren mempunyai keterkaitan yang erat dan tidak terpisahkan dengan lingkungannya. Sebuah lembaga pendidikan yang sangat unik juga terkenal dengan keistimewaanya yang telah banyak melahirkan para ahli dalam semua bidang, utamanya dibidang agama. Pada masa penjajahanpun pesantren tidak sedikit memberikan sumbangsih bagi kemerdekaan indonesia. Dengan keistimewaan itulah pesantren bisa eksis sampai sekarang.

Selain itu, pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang masih eksis dari dulu hingga sekarang karena dunia pesantren mewarisi dan memelihara kontinuitas tradisi Islam yang dikembangkan ulama dari masa ke masa, tidak terbatas pada periode tertentu dalam sejarah Islam (Azyumardi Azra, 1999: 107). Atau, dalam bahasa Martin Van Bruinessen (1992: 73), munculnya pesantren ini adalah untuk mentransmisikan Islam tradisional sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab klasik yang ditulis berabad-abad yang lalu. Pesantren juga merupakan tempat untuk mendidik calon-calon pemimpin di tengah masyarakat, yang karenanya kebutuhan akan pesantren merupakan kebutuhan yang tidak dapat diabaikan saja. Hal ini dapat dilahat dari realitas sosial bahwa banyak di kalangan pemuka masyarakat adalah jebolan pesantren. Oleh karena itu, pesantren akan menjadi salah satu sentral pendidikan Islam di masa yang akan datang. Selain itu, mau tidak mau pesantren harus siap dengan era masa depan. Dalam era tersebut, agama akan menjadi tolak ukur kehidupan manusia. Oleh karena itu, pesantren akan memegang kendali yang sangat signifikan bagi umat Islam Indonesia.[[6]](#footnote-6)

Di Jawa Timur saja, menurut Data Statisitik Direktorat Pendidikan Keagamaan Dan Pondok Pesantren Departemen Agama, pada tahun 2007 tercatat 4.404 pesantren, Jawa Tengah 2.187 pesantren, Jawa Barat 3.561 pesantren, Jakarta 87 pesantren. Dalam skala nasional, berdasarkan kategori pesantren, jenis pesantren salaf (tradisional) di Indonesia sebanyak 8.905 pesantren, pesantren khalaf (modern) sebanyak 878 pesantren, dan pesantren terpadu sebanyak 4.284 pesantren. Total keseluruhan tak kurang dari 14.000 pesantren di Indonesia.

Dalam perjalanannya, pesantren tidak lepas dari tantangan baik yang bersifat internal maupun eksternal, khususnya diera modern ini. Diantara tantangan yang bersifat eksternal antara lain adalah adanya anggapan bahwa pesantren hanya mampu mencetak ahli dibidang agama, sehingga dianggap tidak bisa menghasilkan lulusan yang sesuai dengan perkembangan zaman, dimana bukan hanya keimanan dan ketakwaan (imtak) saja yang dibutuhkan, tetapi juga ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Meskipun pada saat ini ditemukan banyak pesantren yang menggabungkan pendidikan agama dan umum untuk memenuhi tantangan zaman, namun dapat dikatakan masih sedikit (berbanding dengan keseluruhan jumlah pesantren yang ada) yang benar-benar dapat mencetak para santri yang menguasai kedua bidang tersebut.

Tantangan selanjutnya adalah beberapa pesantren, utamanya di era sekarang nampaknya mulai melupakan substansinya sebagai lembaga yang juga berurusan dengan pembinaan masyarakat. Beberapa pesantren tampaknya menutup diri dengan keadaan sosial masyarakat sekitarnya. Hal ini dikarenakan pesantren disibukkan dengan mengurusi masalah internal seperti pengaturan santri, perekonomian pesantren, dan lain-lain. Hal ini terjadi juga dikarenakan tidak adanya ”kuasa” pesantren terhadap masyarakat sekitarnya untuk melakukan pendidikan dan pembinaan dengan semaksimal mungkin. Berbeda dengan terhadap para santri yang telah ”diserahkan” sepenuhnya oleh para orang tua mereka untuk mendapatkan pendidikan dan pembinaan yang sebaik mungkin.

Selanjutnya, beberapa kiai dipesantren sekarang mulai terjun dalam dunia politik. Hal ini berimbas pada memudarnya kharismatik kiai tersebut dan juga sedikit memudarnya pandangan baik masyarakat pada pesantren. Padahal sebuah pesantren yang maju juga ditentukan oleh kekharismatikan kiainya, karena pesantren adalah lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat, sehingga baik tidaknya juga diukur dari pandangan masyarakat pada pesantren tersebut.

Sedangkan tantangan yang bersifat internal antara lain adalah beberapa pesantren terlihat belum mencerminkan betul arti kebersihan yang dalam Islam begitu dijunjung. Tampak beberapa pesantren kumuh, padahal dalam setiap pelajaran diajarkan bahwa “kebersihan sebagian dari iman”. Hal ini merupakan hal yang sepele namun bisa dikatakan perlu mendapat perhatian. Tantangan lain adalah dari aspek ekonomi. Aspek ekonomi berperan besar bagi kemajuan sebuah lembaga pendidikan. Beberapa Pesantren juga tampaknya belum bisa berkembang dikarenakan faktor ekonomi, mereka lebih fokus pada sumbangsing masyarakat, atau berdiri apa adanya. Dan berkaitan dengan permasalahan perempuan, tantangan yang cukup besar juga adalah masih sedikitnya jumlah pesantren yang benar-benar memposisikan perempuan sesuai dengan porsinya menurut ajaran Islam, apalagi mengajarkan para santrinya untuk turut berjuang memperjuangkan hak dan martabat perempuan, tentunya yang sesuai dengan ajaran agama Islam yang sangat memperhatikan permasalahan perempuan.

Namun demikian, pesantren merupakan satu lembaga yang ada dan masih tetap terus eksis di Indonesia.[[7]](#footnote-7) Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dewasa ini model pesantren menjadi model alternatif bagi pengembangan pendidikan di Indonesia. Munculnya berbagai sekolah yang menganut sistem pendidikan pesantren telah menunjukkan bahwa pesantren merupakan basis subkultur yang sangat signifikan.

**2.2 KH. Muhyiddin Abdusshomad dan Pondok Pesantren Nurul Islam (NURIS)**

Kota Jember merupakan salah kota yang mempunyai ciri khas budaya masyarakat ke-timura-an. Salah satu faktornya adalah masyarakatnya yang religius mempunyai potensi tersendiri untuk selalu menghiasi kehidupannya dengan nilai-nilai keagamaan. Masyarakat yang religius juga harus dibarengi dengan membuka wacana, mempelajari dan mengamalkan nilai keislaman secara *kaffah,* sebagai pijakan dasar dalam melaksanakan segala kegiatan sehari-hari. Namun di sisi lain, derasnya arus modernisasi yang ditandai dengan pesatnya perkembangan informasi dan komunikasi dunia telah membawa perubahan-perubahan mendasar pada moral dan perilaku di kalangan generasi muda. Untuk itu perlu adanya suatu penetrasi-penetrasi yang diharapkan mampu membendung arus besar modernisasi yang tanpa kita sadari telah menimbulkan erosi terhadap nilai-nilai sosial budaya dan agama yang kita anut dan kita pertahankan selama ini.

Salah satunya adalah melalui pondok pesantren sebagai salah satu lembaga keislaman yang berfungsi multidimensi, yang selama ini masih mampu sebagai bumper dari derasnya serangan modernisasi. Ternyata masyarakat sadar akan bahaya yang selalu mengintai setiap saat, sehingga muncullah inisiatif mereka untuk berupaya merealisasikan maksud diatas. Maka berdirilah beberapa pesantren di Jember untuk mewujudkan sebuah lembaga pembinaan dan pendidikan bagi masyarakat.

KH. Muhyiddin Abdusshomad merupakan sosok kiai kelahiran Jember 5 Mei 1955. Semenjak muda, beliau merupakan sosok yang gigih dlam mencari ilmu. Beliau belajar al-Qur'an pada ayahanda dan ibundanya sendiri, yaitu KH.Abdusshomad dan nyai Hj.Maimunah di Pondok Pesantren Darussalam Jember. Selain itu, KH.Muhyiddin Abdusshomad juga belajar di Pondok Pesantren Raudlatul Ulum asuhan KH.Umar dan KH.Khotib Umar pada tahun 1966 sampai tahun 1973. Dilanjutkan dengan nyantri ke Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan asuhan KH.Kholil Nawawi pada tahun 1973-1980. Di pesantren ini juga beliau mengikuti pelatihan kader ASWAJA bimbingan KH.Khoiron Husain dan KH.Basori Alwi pada tahun 1975-1977.[[8]](#footnote-8)

Pada tahun 1095-1996 beliau mengikuti pelatihan PPWK (Program Pengembangan Wawasan Keulamaan) yang diselenggarakan oleh Lakpesdam PBNU dan pada tahun 1996 mendapatkan ijazah ilmiah 'ammah dari Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki. Beliau memulai kiprahnya di Nahdlatul Ulama sejak tahun 1983 ketika menjadi pengurus Majlis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU). Pernah juga menjadi sekretaris Rabithah Ma'had al Islamiyah PCNU Jember, wakil katib PCNU Jember, ketua tanfidzuyah PCNU Jember dan saat ini menjabat sebagai Rois Syuriah PCNU Jember.

Selain pengabdiannya di NU, masyarakat dan pesantren, beliau juga banyak menulis buku tentang aswaja. Antara lain adalah Fiqh Tradisionalis, Jawaban Perbagai Persoalan Keagamaan Sehari-hari, Tahlil dalam Perspektif al-Qur'an dan Hadits (Kajian Kitab Kuning), Hujjah NU, Akidah-Amaliah-Tradisi, al Hujaj al-Qathiyyah fii al shahih al-Mu'taqad wa al Amaliyyat an Nahdliyyah, dan masih banyak lagi. Juga beberapa karya dan tulisan beliau tentang perempuan, antara lain buku Stop Kekerasan terhadap Perempuan, Etika Pergaulan di Tengah Gelombang Perubahan (Kajian Kitab Kuning) dan lain-lain[[9]](#footnote-9).

 **2.2.1 Sejarah dan Kurikulum Pondok Pesantren Nurul Islam ( NURIS )**

Bertepatan pada tahun 1981, didirikanlah sebuah pondok pesantren yang beralamat di Jalan Sarangan 38 ( Jl. Pangandaran 48 ) Kelurahan Antirogo Kecamatan Sumebrsari. Dengan menempati luas Lahan sekitar 5 Hektar yang saat ini dikenal dengan nama Pondok Pesantren Nurul Islam ( NURIS ). Pada awal mula berdirinya pondok pesantren ini, kurikulum yang dipakai masih sangat tradisional sekali, sama dengan kurikulum kebanyakan pondok pesantren yang telah ada pada saat itu.
Pada tahun 1983 dirikan SMP NURIS dan selanjutnya pada tahun 1989 berdiri SMA NURIS dan disusul dengan didirikannya SMK NURIS pada tahun 2002. Seiring dengan perjalanan waktu didirikan pula TK Bina Prasa NURIS dan Play Group NURIS , dan pada tahun ini akan berdiri Madrasah Tsanawiyah Unggulan NURIS dengan jumlah maksimal 30 siswa . Namun yayasan tidak mendirikan Sekolah Tingkat Dasar baik SD / MI karena di lingkungan Antirogo sudah ada sekitar 12 sekolah Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah yang masing-masing tempatnya saling berdekatan.

Pada saat ini, jumlah santri di Pondok Pesantren Nurul Islam ( NURIS ) sebanyak 300 santri, 156 santri lelaki dan 175 santri perempuan. Pada garis besarnya, kurikulum yang diterapkan dalam pesantern ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu
Kurikulum Non Formal yang dikelola sepenuhnya oleh pondok pesantren tanpa campur tangan lembaga formal ( Diknas dan Depag ) walaupun sistem pembelajaran yang diterapkan menggunakan sistem Klasikal Berjenjang ( Madrasah Diniyah Ula dan Madrasah Diniyah Wustho) dan Kurikulum Formal yang mengacu pada Depertemen Pendidikan Nasional ( Play Group NURIS, TK Bina Prasa NURIS, SMP NURIS, SMA NURIS, dan SMK NURIS ) dan kurikulum yang mengacu pada Departemen Agama ( yaitu Madrasah Tsanawiyah NURIS dan juga Paket C NURIS ).

Untuk Kurikulum pendidikan formal yang berafiliasi dengan Diknas semisal SMP, SMA dan SMK pengayaan kurikulum agamanya bekerjasama dengan berbagai lembaga – lembaga kaagamaan semisal Lembaga Ma’arif NU . Kurikulum agama itu berisi tentang materi-materi agama yang berwawasan plural dan juga multikultural[[10]](#footnote-10).

Disamping itu , pesantren juga mengadakan kegiatan ekstra untuk menambah wawasan pengetahuan santri antara lain yang sedang berjalan adalah : Kajian Kitab Kuning, Pengembangan Bahasa Asing ( Arab & Inggris ), Muhadhoroh, Pengembangan keilmuan melalui karya tulis yang dikemas dengan penerbitan Majalah Nuris yang sudah terbit dua edisi, serta diskusi seputar pengetahuan aktual yang diasuh dan dibina langsung oleh putera dari pengasuh pesantren sendiri yaitu Gus Robith Qoshidi, LC.

Dalam proses belajar mengajar, dikembangkan berbagai pola pembelajaran dan metode yang berbeda-beda sesuai dengan materi yang diajarkan kepada siswa. Adapun metode pembelajaran yang dimaksud adalah metode ceramah, metode diskusi, tanya jawab, metode demonstrasi dan yang lagi aktual dikalangan santri saat ini adalah belajar dengan memamfaatkan Internet bantuan ICIP dengan mengexplor situs – situs yang terkait dengan materi ajar tentunya dengan bimbingan para ustadz yang sebelumnya memang sudah dilatih untuk mengunakan dan memanfaatkan media tersebut. Atau juga dengan menggabungkan semua metode tersebut dalam satu mata pelajaran. Dengan metode yang bervariasi tersebut, diharapakan siswa dapat mengembangkan kemampuan kognitif, afektif maupun psikomotorik. Selain itu dalam proses belajar mengajar di Ponpes NURIS, selalu diterapkan kesetaraan antara santriwan dan santriwati. Di dalam kelas tidak dibedakan perlakuan antara laki-laki dan perempuan, tetapi tetap dalam pengawasan guru-guru yang mengawasi atau para ustadz dan ustadzah.[[11]](#footnote-11)

Kerjasama Pesantren dengan masyarakat sekitar berjalan dengan baik. Kerjasama yang di lakukan dengan masyarakat sekitar misalnya dengan adanya pengajian muslimat yang diadakan semingu sekali tepatnya setiap hari minggu ( siang ) , Kajian Kitab Ahlussunnnah Waljama’ah bagi warga sekitar diadakan setiap hari minggu ( pagi ) , dan untuk pengajian wali murid di jadwal setiap ahad legi. Kegiatan-kegiatan tersebut nyata memberi manfaat yang bisa diberikan pesantren pada masyarakat secara riil, baik dalam bentuk pendidikan yang formal maupun pendidikan yang non formal.
Kemudian Pondok Pesantren juga sering mengadakan kegiatan – kegiatan lain yang sifatnya sporadis, berkala, misalnya kagiatan sosial Sunat masal ( 2003 ) bekerjasama dengan PTPN XII Jember, Penjualan Sembako murah bekerjasam Depkop ( 1987 ). Pesantren juga sering menerima tokoh – tokoh nasional seperti : K.H. Abdurrohman Wahid , H.j Sinta Nuriah M.Hum, Dr. Amien Rois, Srisultan Hamengkubono IX ( Gubenur DIY ), Sutrisno Bahir ( Ketua PAN ), M.H. Ainun najib ( Budayawan ), Zawawi Imron ( Budayawan ), Rhoma Irama ( Musisi ) dan banyak lagi tokoh lain dari berbagai kalangan. Selain itu hubungan dengan sesama pesantren juga berjalan dengan baik dan sering mengadakan berbagai pelatihan diantaranya pelatihan tentang kesetaraan gender kerjasama dengan Rohima dan Puan Amal Hayati , dan Pelatihan Teknik Pertanian Tembakau[[12]](#footnote-12).

**2.2.3 Visi, Misi, dan Tujuan Pondok Pesantren Nurul Islam ( NURIS )**

Sebagai sebuah lembaga pendidikan, Pondok Pesantren Nurul Islam ( NURIS ) mempunyai visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai demi terwujudnya pesantren yang dapat terus bertahan dan maju serta mencetak generasi-generasi yang bermanfaat. Adapun visi Ponpes NURIS adalah *“Menjadi wadah pembentukan generasi yang berakhlak mulia, berbudi Islami, dan berprestasi”.* Sedangkan misi pesantren ini adalah :

1. Membiasakan prilaku yang berakhlakul karimah
2. Membiasakan ritualitas keagamaan dalam kehidupan sehari-hari
3. Menumbuhkembangkan kreasi seni dan tradisi Islami
4. Meningkatkan profesionalisme dan membina kreatifitas pembelajaran
5. Melengkapi sarana dan prasarana pembelajaran

 Selain memiliki visi dan misi, pesantren ini juga mempunyai beberapa tujuan yang ingin dilaksanakan, yaitu :

1. Membentuk dan mengembangkan generasi muslim sebagai kader bangsa yang tangguh, memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, berakhlakul karimah, sehat, terampil, patriotik, dan beramal sholeh.
2. Mengembangkan kualitas sumberdaya manusia melalui pendekatan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan nasional.
3. Berpartisipasi aktif dan kritis dalam pembinaan dan pengembangan masyarakat.
4. Menegakkan ajaran Islam yang murni dengan menempuh manhaj *Ahlus Sunnah wal Jama’ah* dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**2.3 KH. Drs. Abdul Hamid Chidlir dan Madrasah Ash-Shiddiqi Putri (ASHRI)**

Tidak dapat dipungkiri bahwa pesantren merupakan salah satu sarana pendidikan di Indonesia yang berhasil mencetak para ulama dan juga para ilmuwan. Pesantren juga merupakan sarana untuk mencetak generasi yang mandiri dan berdikari. Namun dengan adanya kurikulum tertentu tentang pendidikan di Indonesia yang ditetapkan oleh pemerintah, beberapa pesantren melebarkan sayapnya dengan membuka sekolah dengan berdasarkan kurikulum dari pemerintah namun tetap dengan memasukkan nilai plus pesantrennya, yang biasa dikenal dengan sebutan madrasah. Pesantren jenis ini merupakan salah satu dari beberapa jenis pesantren yang ada di Indonesia.

 Berdasarkan keputusan Mentri Agama RI No. 3/1979 (1984: 14-15) menyatakan bahwa pondok pesantren terbagi menjadi empat jenis yaitu *pertama*, pondok pesantren dimana para santri belajar dan bertempat tinggal bersama guru (kiai) dan menggunakan kurikulum yang ditentukan oleh kiai sendiri tanpa menyelenggarakan sebuah madrasah. *Kedua,* pondok pesantren yang mempunyai madrasah dan mempunyai kurikulum; pengajaran dari kiai dilakukan dengan cara stadium general dan pengajaran pokok terletak pada madrasah yang diselenggarakannya, kiai memberikan pelajaran secara umum kepada para santri pada waktu yang telah ditentukan dan para santri tinggal di lingkungan itu untuk mengikuti pelajaran-pelajaran dari kiai di samping mendapat ilmu pengetahuan umum di madrasah. *Ketiga,* pondok pesantren yang fungsi utamanya hanya sebagai tempat tinggal atau asrama, para santri belajar di madrasah atau sekolah-sekolah umum. Fungsi kiai di sini adalah sebagai pengawas, pembina mental dan pengajar agama. *Keempat*, pondok pesantren yang menyelenggarakan sistem pondok dan sekaligus sistem sekolah/madrasah.[[13]](#footnote-13) Dan menurut pembagian pesantren di atas, Pondok Pesantren Ash-Shiddiqi Putri (ASHRI) merupakan salah satu contoh pesantren jenis keempat, karena pesantren ini selain tetap menggunakan sistem pengajian klasik/kitab, juga menggunakan sistem sekolah atau madrasah yang dipimpin oleh KH.Drs.Abdul Hamid Chidlir.

**2.3.1 Biografi KH. Abdul Hamid Chidlir**

Selain KH. Muhyiddin, nama KH. Abdul Hamid Chidlir merupakan salah satu nama yang cukup dikenal di daerah Jember. Ini karena kiprah beliau di Jember yang tidak sedikit, khususnya dalam dunia pendidikan. Meskipun beliau bukan putra daerah, namun keterlibatan dan perjuangannya dalam membangun kota Jember tidak dapat dipungkiri lagi. Kiai yang akrap disapa dengan panggilan “gus Hamid” ini adalah lelaki kelahiran kota Bangil Jawa Timur. Beliau dilahirkan pada 1 Juni 1945 dari seorang ibu Halimah dan bapak Muhammad Chidlir. Beliau adalah lulusan dari Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang dibawah asuhan KH. Mustain Romli. Tidak seperti kebanyakan kiai, selain aktif dalam pesantren, yaitu sebagai Ketua Majlis Madrasah As-Shiddiqi Putri (ASHRI), beliau juga mengabdi di Departemen Agama Jember, yaitu sebagai Kasubsi MTQ, HBI dan Tamadun seksi Penais Kandepag Kabupaten Jember pada 1975-1982, Kasubsi Siaran, Tamadun dan Publikasi pada 1983-1990, Kasubsi Doktik Rua Islam pada 1990-1996, Kasubsi MI Rua Islam pada 1996-2001, dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Kandepag Jember pada 2001-2005. Selain itu, beliau juga aktif di Jam’iyatul Qurro wal Huffadz Cabang Jember, Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Jember, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Cabang Jember, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Nahdlatul Ulama Cabang Jember. Jabatan yang saat ini beliau tanggung selain sebagai katib syuriah PCNU Jember adalah sebagai Ketua Majlis ASHRI merangkap Kepala Madrasah Tsanawiyah ASHRI, Ketua Komite MTsN Jember, dan Ketua PERGUNU Cabang Jember[[14]](#footnote-14).

 Dari sekian kesibukan yang gus Hamid lakukan sejak dahulu sehingga sekarang, jelas nampak bahwa kesibukan-kesibukan beliau tidak lari dari dunia pendidikan. Namun demikian, dunia pendidikan yang digelutinya tidak hanya terbatas pada dalam madrasah sendiri, namun beliau juga aktif di luar madrasah. Ini menunjukkan bahwa gus Hamid memiliki sifat terbuka, dalam arti tidak mengeksklusifkan diri dan madrasahnya dari dunia luar. Beliau juga merupakan salah satu peserta seleksi Keluarga Sakinah Teladan Nasional pada tahun 2001. Istri beliau, Hj. Faiqotul Himmah yang juga aktif mengajar di pesantren dan madrasah, juga merupakan salah satu aktifis perempuan di Jember, yaitu pernah menjabat sebagai ketua Fatayat NU Cabang Jember selama 3 periode dan juga pernah menjabat sebagai ketua Muslimat NU Cabang Jember selama dua periode. Dari sini nampak bahwa gus Hamid merupakan sosok kiai yang *welcome* terhadap perempuan yang aktif di dalam dan juga di luar rumah.

**2.3.2 Sejarah dan Kurikulum Madrasah Ash-Shiddiqi Putri (ASHRI)**

 Awal berdirinya Pondok Pesantren Ash-Shiddiqi Putri ini dirintis oleh almarhum KH. Abdul Chalim Shiddiq pada tahun 1931, berlokasi di kompleks peninggalan almarhum KH. Muhammad Shiddiq (mbah Shiddiq) yang berada di Jalan KH. Shiddiq yang pada saat ini menjadi lokasi PPI ASHTRA. Beliau juga *murabbi* Pondok Pesantren Islam Ash-Shiddiqi dan juga Kepala Jawatan Agama Kabupaten Jember. Bermula dengan jumlah santri puteri 12 orang, beliau mendidik santri-santri putri dengan sistem sorogan, tanpa kurikulum tetapi berdasarkan pada jenjang tingkatan yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing santri. Dengan semakin bertambahnya jumlah santri, pada tahun 1957 beliau mulai membangun kompleks pondok pesantren yang dikhususkan untuk perempuan yang pada tahun 1964 telah mulai ditempati dengan jumlah santri perempuan pada saat itu menjadi 70 orang. Dalam pembelajaran yang dilakukan, beliau dibantu oleh istri beliau, nyai Hj. Muzayyanah dan juga para santri senior sebagai kaderisasi dan persiapan sebagai tenaga pengajar/guru.

 Pada tahun 1965 secara efektif Madrasah ASHRI dibuka dengan sistem dan kurikulum yang disusun sesuai dengan tujuan didirikannya PPI ASHRI ini. Sistem klasikal tetap diterapkan yang dipimpin langsung oleh KH. Abdul Chalim Shiddiq sebagai kepala madrasah dengan tenaga bantuan beberapa guru dari luar, antara lain KH. A. Muchit Muzadi, ustad Danial Adimenggolo (almarhum), ustad Abdul Hadi (almarhum), dan lain-lain. Menyusul efektifnya pendidikan madrasah ini, didirikannya juga radio amatir yang dikenal dengan nama Radam Ashria (Radio Amatir Ash-Shiddiqi putera dan puteri), di mana seluruh crewnya adalah para santri puteri, kecuali tenaga tehnisi. Namun demikian, perkembangan pesantren dan madrasah ASHRI yang demikian pesat ini dikejutkan oleh peristiwa yang sangat memilukan, yaitu wafatnya pendiri (*muassis)* dan pengasuh (*murabbi)* pesantren, KH. Abdul Chalim Shiddiq pada 16 Muharram 1391/ 23 Maret 1970, dan pada 1973 istri beliau nyai Hj. Muzayyanah juga wafat[[15]](#footnote-15).

 Selanjutnya, pesantren dan madrasah ASHRI dilanjutkan oleh putra putri beliau, yaitu KH. M. Syauqi AS dan KH. M. Saifur Rijal yang bertanggung jawab pada pesantren (yaitu sistem pendidikan yang tradisional dan tidak mengikuti kurikulum pendidikan pemerintah), dan KH. Abdul Hamid Chidlir yang bertanggung jawab pada madrasah formal yang pada saat ini terdiri dari madrasah Ibtidaiyah, madrasah Tsanawiyah, dan madrasah Aliyah. Dan pada penelitian ini, KH. Abdul Hamid Chidlir yang dipilih sebagai responden karena beliaulah yang bertanggung jawab mengelola madrasah ASHRI yang secara sekilas mempunyai aktifitas yang lebih padat daripada pesantrennya, meskipun dua lembaga ini dibawah satu payung ASHRI dan saling terkait satu sama lain.

 Dalam perjalanannya sampai saat ini, Madrasah ASHRI terdiri dari Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah. Data pada tahun 2017/2018 menyebutkan bahwa jumlah siswi Madrasah Tsanawiyah adalah 296 siswi dan untuk Madrasah Aliyah sejumlah 259 siswi.

 Untuk dapat lebih memajukan madrasah, sekolah ini mempunyai 7 Program Utama (TUPROTAMA) tahun 2010/2011 yaitu:

1. Peningkatan aplikasi pengabdian semua unsur pengelola Madrasah, berdasarkan ketulusan niat yang ikhlas untuk beribadah semata.
2. Peningkatan pelayanan kepada siswi dan orang tua / wali siswi, agar krasan dan bangga di Madrasah ASHRI.
3. Peningkatan prestasi hasil belajar untuk mencapai lulus UNAS 100% sekaligus mencapai keberhasilan Tri Program Madrasah : Berilmu Amaliyah, Beramal Ilmiyah, dan Berakhlakul Karimah.
4. Peningkatan integritas sumber daya tenaga Madrasah, menuju kelayakan kualitas, guna mencapai tingkat dedikasi dan prestasi kerja yang maksimal.
5. Peningkatan dedikasi dan mekanisme tata kerja menuju efesiensi yang optimal.
6. Peningkatan sarana dan prasarana Madrasah untuk menunjang keberhasilan program Madrasah.
7. Peningkatan kesejahteraan lahir batin setiap siswi dan pengabdi Madrasah, guna mencapai tingkat hidup yang *tuma’ninah* dan bahagia[[16]](#footnote-16).

 Sedangkan untuk para guru, Madrasah ini mempunyai kebijakan sendiri dengan membagikan guru dalam 4 kategori, yaitu *pertama*, Guru Pemilik yang terdiri dari guru-guru yang merupakan keluarga dari pengasuh pondok pesantren ini. *Kedua*, Guru Pendiri, yaitu para guru yang terlibat dalam proses pendirian Madrasah, baik dari kalangan keluarga pesantren sendiri maupun dari kalangan bukan keluarga. *Ketiga,* Guru Kelayakan, yaitu para guru yang diangkat sesuai dengan peraturan umum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Misalnya bahwa guru minimal berkelulusan S1, guru memegang mata pelajaran sesuai dengan bidangnya masing-masing, dan lain-lain. Dan *keempat* adalah Guru Profesional, yaitu para guru yang tidak memenuhi peraturan pemerintah namun memiliki keahlian dalam bidang masing-masing. Dan untuk tetap melanggengkan tradisi pesantren di lingkungan Madrasah, sekolah ini melakukan rutinitas budaya doa dan *nadhoman* di awal pelajaran dan doa di akhir pelajaran. Selain itu, karena Madrasah merupakan bagian dari Pesantren, maka kebijakan Madrasah juga bahwa jam pertama dari Madrasah ini kurang stabil, yaitu terkadang tidak tepat waktu dikarenakan ada pengajian dari Pengasuh Pesantren.

 Adapun kegiatan penunjang yang dilaksanakan dalam Madrasah ini antara lain adalah:

1. Sholat Dhuha dan kegiatan *diniyah*. Kegiatan ini dilaksanakan sebelum kegiatan belajar mengajar, yang dimulai pada pukul 06.45 WIB. Dalam kegiatan *diniyah* seperti *istighotsah* dan *khotmil qur’an* ini akan dipimpin oleh para guru perempuan dengan jadwal bergilir-gilir. Kegiatan ini selain untuk melatih para siswi agar lebih “berbobot”, juga sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan kemampuan para guru perempuan untuk dapat memimpin dan membimbing para sisiwi dalam kegiatan keagamaan.
2. Adanya beasiswa bagi para siswi yang berprestasi yang diberikan oleh Madrasah pada akhir tahun pelajaran (pada waktu kenaikan kelas).
3. Adanya perpustakaan, laboratorium al-Qur’an dan bahasa, laboratorium komputer, dan ruang visualisasi sebagai sarana penunjang bagi para siswi.
4. Diadakannya mata pelajaran keterampilan Tata Boga, Tata Busana dan Tata Rias untuk memberikan bekal hidup di masyarakat di masa depan para siswi. Materi yang diberikan banyak mengarah kepada praktek yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Materi ini masuk dalam kurikulum Madrasah 2 jam dalam satu minggu.
5. Adanya Unit Kesehatan Siswi (UKS) yang dibuka pada setiap hari sabtu dan ahad. UKS ini bekerja sama dengan dr. H. Iqbal Fathoni dan drg. Yuliana MDA, M.Kes (yang merupakan putri Gus Hamid sendiri). Pengkaderan terhadap petugas UKS juga dilakukan kepada para siswi untuk memberikan bekal kepada mereka tentang masalah kesehatan.
6. Program tartil al-Qur’an dengan tujuan agar para siswi dapat membaca al-Qur’an dengan baik yang masuk dalam kurikulum Madrasah 2 jam dalam satu minggu.
7. Silaturrahim Dewan Guru untuk memupuk rasa persaudaraan dan kebersamaan antar guru. Kegiatan ini dilaksanakan setiap bulan dengan cara anjangsana ke rumah para guru secara bergantian. Dalam acara silaturrahim ini akan diisi dengan *khotmil qur’an* dan kajian al-Qur’an.
8. Adanya Paguyuban Guru ASHRI, yaitu kegiatan simpan pinjam bagi para dewan guru dalam rangka meningkatkan kesejahteraan para guru.
9. Praktek Kerja Lapangan (PKL). Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk membina para siswi agar berjiwa sosial dan mampu mewujudkan dirinya di tengah masyarakat pada setiap saat. Dengan tanpa meninggalkan harkat dan martabat sebagai seorang ibu rumah tangga, maka para siswi kelas III diwajibkan mengikuti Praktek Kerja Lapangan ini sebelum mengikuti evaluasi terakhir. Tujuan dari PKL ini adalah untuk mengamalkan ilmu yang telah diperoleh di Madrasah untuk diterapkan secara langsung dalam masyarakat. Di antara lokasi yang dijadikan sasarn kegiatan PKL adalah Desa Puger Bondowoso, Desa Labruk Lumajang, Desa Alas Malang Situbondo, Desa Kalibaru Kulon Banyuwangi, dan lain-lain[[17]](#footnote-17).

**2.3.3 Visi, Misi, dan Tujuan Madrasah ASHRI**

 Visi dari Madrasah ASHRI adalah “Menjadikan Madrasah ASHRI yang berorientasi pada tujuan Pondok Pesantren Islam Ash-Shiddiqi Puteri yang mencetak kiai perempuan dengan mengedepankan akhlakul karimah, sebagai landasan ilmu dan keterampilan, yang dimiliki peserta didik”. Sedangkan misi Madrasah ini adalah “Memberikan ilmu yang amaliyah dan amal yang ilmiyah serta memberikan bimbingan pembinaan akhlak dalam bentuk peneladanan kehidupan sehari-hari atas dasar ajaran Islam *Ahlus Sunnah wal Jama’ah*”. Dan tujuan Madrasah ini adalah “Terwujudnya peserta didik yang cerdas, terampil, dan berkepribadian *mar’atus sholihah* dan berpegang teguh pada akidah Islam *Ahlus Sunnah wal Jama’ah*”[[18]](#footnote-18).

**2.4 Kiai dan Kehidupan Sosial Masyarakat**

Pada awal dasawarsa 1970-an, Mukti Ali yang pada masa itu menjabat sebagai menteri agama, menyerukan adanya peremajaan sistem nilai pesantren dan agar pesantren hendaknya bertindak sebagai agen perubahan dalam masyarakat Indonesia agar dapat memfasilitasi pengembangan masyarakat (Greg Barton, 2002: 114). Dan hal ini dapat dilihat bahwa pesantren dalam perjalanannya telah dapat mengemban amanat perubahan dalam program pengembangan masyarakat. Dengan demikian, pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh pesantren menurut Abdurrahman Wahid (1987: xiii) memiliki watak emansipatoris, karena yang dituju adalah optimasi kemampuan mereka yang lemah dan miskin untuk mengembangkan sumber-sumber daya sendiri, dan dengan demikian membuat mereka mampu menentukan nasib sendiri.[[19]](#footnote-19) Kunci perubahan yang membawa makna baru bagi kehidupan itu adalah watak emansipatoris yang dimiliki perubahan itu sendiri.

 Pesantren dengan unsur-unsur yang ada padanya (kiai, majid, santri, dan kitab kuning) telah berfungsi sebagai sarana pendidikan dalam membentuk perilaku sosial budaya santri. Peran kiai dan santri dalam menjaga tradisi keagamaan akhirnya membentuk sebuah subkultural pesantren, yaitu suatu gerakan sosial budaya yang dilakukan komunitas santri dengan karakter keagamaan dalam kurun waktu relatif panjang. Hadimulyo (1985: 98-99) juga menyatakan bahwa sisi lain yang perlu juga diperhatikan oleh kalangan sarjana adalah hubungan antara subkultural pesantren dengan pengaruh perubahan sosial. Apakah pesantren memilih bersikap akomodatif terhadap perubahan sosial atau tetap menjaga jarak adalah merupakan pengaruh dari pola hubungan antara kedua ikatan sosial tersebut.

 Namun demikian, pengembangan masyarakat yang telah banyak dilakukan adalah bersifat makro, dalam arti yang dilakukan oleh gerakan-gerakan besar. Sedangkan yang masih agak kurang adalah kajian tentang perubahan pandangan hidup yang dilakukan oleh individu, atas dasar wawasan keagamaan. Setiap pesantren memiliki karakteristik tersendiri dan unsur-unsurnya berbeda antara satu pesantren dengan pesantren lainnya. Namun demikian, adalah merupakan realitas sosial, bahwa pengaruh yang datang dari luar yang direspon seorang kiai tergantung pada kehendak kiai sarana yang dimiliki pesantren. Hal ini sebagaimana yang telah diungkapkan oleh teori Geertz (1983) tentang peranan kiai sebagai ”makelar budaya” *(cultural broker).* Menurut Geertz, kiai berperan sebagai alat penyaring atas arus informasi yang masuk ke lingkungan kaum santri, menularkan apa yang dianggap berguna dan membuang apa yang dianggap merusak bagi mereka. Namun, menurut Geertz, peranan penyaring itu akan terhambat apabila arus informasi yang masuk begitu deras dan tidak mungkin lagi disaring oleh sang kiai. Dalam keadaan demikian, kiai akan kehilangan peranan dalam perubahan sosial yang terjadi. Akibat peranannya yang sekunder dan tidak kreatif, kiai akan mengalami kesenjangan budaya *(cultural lag*) dengan masyarakat sekitarnya.

 Sedangkan menurut Horikoshi dalam penelitiannya tentang Kiai Yusuf Tajri (1976) menunjukkan bahwa kiai berperanan kreatif dalam perubahan sosial. Bukan karena sang kiai mencoba meredam akibat perubahan yang terjadi, melainkan justeru karena memelopori perubahan sosial dengan caranya sendiri. Kiai bukan melakukan penyaringan informasi, melainkan menawarkan agenda perubahan yang dianggapnya sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat yang dipimpinnya. Ia bukan kurang berperan karena menunda datangnya perubahan melalui proses penyaringan informasi, melainkan ia sepenuhnya berperan karena ia mengerti bahwa perubahan sosial adalah perkembangan yang tidak dapat dielakkan lagi. Masalah yang dihadapinya adalah bagaimana kebutuhan agar perubahan itu dapat dipenuhi tanpa merusak ikatan-ikatan sosial yang telah ada, melainkan justeru dengan memanfaatkan ikatan-ikatan itu sebagai mekanisme perubahan sosial yang diinginkan.

 Kebutuhan akan perubahan ini, dapat dilakukan dengan berbagai cara dan sisi. Antara lain adalah seperti yang telah dilakukan oleh para kiai, yaitu dengan menggunakan ilmu-ilmu agama sebagai antisipasi terhadap kebutuhan akan perubahan itu, di samping sebagai alat penentu mana bagian esensial dari kehidupan yang tidak dapat ditawar lagi dan harus tetap dipertahankan. Fiqh atau hukum agama merupakan alat utama untuk antisipasi hal itu. Selain itu, tafsir al-Qur’an dan ajaran akhlak atau moralitas individu maupun kolektif dari masyarakat merupakan satu hal yang paling memungkinkan penggunaannya bagi alat antisipasi terhadap kebutuhan akan perubahan akan perubahan pandangan hidup.

 Bagi masyarakat sebuah desa, sosok seorang kiai seringkali tidak hanya menjadi guru bagi mereka dan ank-anak mereka, tetapi juga merupakan seorang tokoh atau pemimpin masyarakat, seseorang yang mereka jadikan sosok pemberi nasehat dalam berbagai macam persoalan, mengharapkan berkah, doa-doa dan pengobatan, bahkan juga perlindungan. Benda misalnya mencatat, penderitaan yang berkepanjangan sebagai akibat dari politik dari kaum priyayi atas masa petani –sebagai akibat dipakainya kaum priyayi oleh pemerintah Belanda sebagai aparat pemaksa- telah menempatkan para kiai sebagai ’surga’ di mana petani mencari perlindungan dan pelepasan (Benda, 1980: 54-55).

 Sartono Kartodirdjo (1973: 7) dalam studinya tentang gerakan-gerakan protes di pedesaan Jawa pada abad XIX dan awal abad XX mencatat, walaupun tidak selalu para kiai, haji dan guru agama memimpin langsung gerakan tersebut, pengaruh mereka sangat besar. Kepercayaan masyarakat desa akan kekuatan-kekuatan supranatural dan magis, sering memberikan kekuasaan karismatis kepada kiai. Di samping itu, karena banyak kiai memimpin pesantren dan tarekat mamiliki banyak pengikut serta ditaati oleh para santrinya, mereka memiliki sarana organisasi dan massa yang dapat mereka gunakan untuk mendukung mereka, bila mereka menghendaki.

 Oleh karena itu, pengaruh sosok kiai dalam kehidupan masyarakat di sekitarnya tidak dapat dipandang sebelah mata. Sejarah membuktikan bahwa pengaruh yang dibawa seorang kiai terhadap masyarakatnya sangat besar dan hal itu masih terus terjadi pada masa ini. Pengaruh tersebut tidak hanya terbatas pada satu permasalahan saja, namun pada hampir keseluruhan permasalahan agama, pengaruh kiai sangatlah besar. Tidak terkecuali terhadap pengaruh kiai terhadap cara pandangnya terhadap perempuan.

 Ajaran dan atau doktrin seorang kiai terhadap para santrinya mengenai posisi perempuan sampai saat ini masih dinilai belum memuaskan karena masih banyak kiai yang belum dapat menerima konsep kesetaraan gender. Namun demikian, dua sosok kiai yang dipaparkan dalam penelitian ini merupakan contoh dari sebagian kecil kiai yang berada di kota Jember yang mendukung bahkan memperjuangkan adanya pemberdayaan terhadap perempuan. KH. Muhyiddin Abdusshomad misalnya, melalui sekolah dan pesantren yang dibimbingnya beliau masih terus memperjuangkan adanya pemberdayaan terhadap perempuan dengan melakukan berbagai kegiatan yang mendukungnya. Di antaranya adalah dengan melakukan beberapa seminar tentang perempuan dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang peduli terhadap perempuan. Juga dengan menerbitkan buku Pendidikan Agama Islam untuk SMA/SMK Kelas XII yang di dalamnya memuat beberapa informasi tentang posisi perempuan menurut ajaran agama Islam.

 Selain itu, KH. Abdul Hamid Chidlir juga masih terus berjuang mempersiapkan cikal bakal perempuan pemimpin masyarakat melalui madrasah yang dibimbingnya. Sebagai contoh nyata adalah, pada setiap tahun Madrasah ASHRI akan selalu mengadakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang merupakan salah satu syarat kelulusan bagi kelas XII selain persyaratan mengikuti ujian sebagaimana sekolah-sekolah yang lain. Kegiatan PKL ini mendidik para siswi untuk terjun langsung di masyarakat dengan berbagai kegiatan, antara lain mengajar sekolah dan ngaji, memimpin kegiatan para ibu-ibu, membantu di Puskesmas, dan lain-lain. Dengan adanya kegiatan ini Gus Hamid berharap para siswi yang nantinya akan lulus dapat benar-benar siap untuk menjadi pembimbing dan pemimpin masyarakat di daerahnya masing-masing.

**BAB III**

**GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

**DI KALANGAN PESANTREN DI JEMBER**

 Dalam lingkup kajian Islam, di antara permasalahan yang hampir senantiasa mengundang kontroversi adalah isu-isu tentang perempuan. Sejumlah jawaban yang telah ada selama ini ternyata tidak cukup untuk menyelesaikan isu-isu tersebut. Bahkan dalam beberapa kasus dapat memicu ketidakpuasan. Boleh dikatakan bahwa isu tentang perempuan adalah permasalahan yang kompleks. Hal ini dikarenakan permasalahan yang menyangkut perempuan pada akhir-akhir ini tidak semata-mata dapat diselesaikan dengan doktrin agama, tetapi perlu juga dengan melihat kepada aspek-aspek sosial, budaya, teologi, maupun sensitivitas gender yang pada waktu-waktu akhir ini semakin marak dibincangkan.

 Isu-isu penting yang menjadi wacana tentang posisi perempuan diantaranya adalah menyangkut masalah penciptaan perempuan, kepemimpinan perempuan dalam rumah tangga, perkawinan, kesaksian, pencarian nafkah, dan perwarisan. Dalil-dalil yang membahas persoalan tersebut pada umumnya dianggap menempatkan posisi laki-laki dengan sangat strategis dan lebih unggul daripada perempuan. Di sini mungkin pendapat Ashgar Ali Engineer (2003: 56) dapat mewakili penjelasan mengapa posisi perempuan dalam agama Islam dianggap menduduki tempat yang sekunder. Al-Qur’an, menurut Engineer, sesungguhnya secara normatif menegaskan konsep kesetaraan status antara laki-laki dan perempuan. Konsep kesetaraan itu mengisyaratkan dua hal. Pertama, dalam pengertiannya yang umum, ini berarti adanya penerimaan martabat kedua jenis kelamin dalam ukuran yang sama. Kedua, orang harus mengetahui bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak-hak yang setara dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. Keduanya harus memiliki hak yang setara, misalnya untuk mengadakan kontrak perkawinan atau memutuskannya; keduanya harus memiliki hak untuk memiliki atau mengatur harta miliknya tanpa campur tangan yang lain; keduanya harus bebas memilih profesi atau cara hidup; keduanya harus sejajar dalam hal tanggung jawab. Akan tetapi, meskipun secara normative al-Qur’an memihak pada kesamaan antara laki-laki dan perempuan, secara kontekstual menyatakan adanya kelebihan-kelebihan tertentu dari laki-laki atas perempuan. Dan dengan mengabaikan konteksnya, menurut Engineer, para penulis fiqh berusaha memberi status yang lebih tinggi pada laki-laki dalam pengertian normatifnya juga.

**3.1 Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Islam**

 Istilah gender telah menjadi topik pembahasan pada setiap diskusi tentang perempuan. Kata gender berasal dari bahasa Inggris, berarti jenis kelamin. Dalam Webster’s New World, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Sedangkan dalam Women’s Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.

 Hilary M. Lips dalam bukunya *Sex and Gender: An Introduction* mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. HT.Wilson memahami konsep gender sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan.Meskipun kata gender belum termasuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, namun istilah tersebut telah lazim digunakan. Khususnya di Kantor Menteri Negara Urusan Pemberdayaan Perempuan dengan ejaan “jender” dan diartikan sebagai interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin yakni laki-laki dan perempuan. Gender biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan.

 Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis. Hal ini berbeda dengan seks yang secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi. Istilah seks lebih banyak berkonsentrasi pada aspek biologis seseorang yang meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi dan karakteristik biologis lainnya. Sementara itu, gender lebih banyak berkonsentrasi pada aspek sosial, budaya, psikologis dan aspek-aspek non-biologis lainnya. Studi gender lebih menekankan perkembangan maskulinitas (*masculinity/rujuliyah*) atau feminitas (*feminity/nisa’iyyah*) seseorang. Sedangkan studi seks lebih menekankan perkembangan aspek biologis dan komposisi kimia dalam tubuh laki-laki (*maleness/zhukurah*) dan perempuan (*femaleness/unutsah*). Untuk proses pertumbuhan anak kecil menjadi seorang laki-laki atau menjadi seorang perempuan, lebih banyak digunakan istilah gender daripada istilah seks. Istilah seks umumnya digunakan untuk merujuk kepada persoalan reproduksi dan aktivitas seksual, selebihnya digunakan istilah gender.

 Untuk lebih memahami konsep gender, pembedaan arti di antara kata *gender* dengan kata *seks* (jenis kelamin) memang benar-benar harus jelas batasannya. Pengertian jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya, bahwa manusia jenis laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, memiliki jakala (kala menjing) dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan adalah manusia yang memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina dan mempunyai alat untuk menyusui. Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada manusia jenis laki-laki dan perempuan selamanya. Artinya, secara biologis, alat-alat tersebut tidak bias dipertukarkan antara alat biologis yang melekat pada manusia laki-laki dan perempuan. Secara permanen dan tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau *kodrat*.

 Gender yaitu satu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Misalnya bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosianal, atau keibuan. Sedangkan laki-laki dianggap sosok manusia yang kuat, rasional, perkasa. Ciri dan sifat ini merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Terdapat laki-laki yang emosional, lemah lembut, dan ada perempuan yang kuat, rasional, perkasa. Perubahan ciri dan sifat-sifat ini dapat terjadi dari satu masa ke masa yang akan datang (Mansour Fakih, 1996: 8-9).

 Pada perkembangan seterusnya, gender kemudian digunakan sebagai pisau analisis untuk memahami realitas sosial berkaitan dengan hubungan perempuan dan laki-laki. Konsep ini, misalnya digunakan untuk menganalisis bahwa pemahaman yang salah mengenai gender sebagai kodrat atau takdir akan merugikan perempuan. Konsep gender inilah yang kemudian menjadi satu konsep asas yang ditawarkan oleh gerakan feminisme kerana konsep ini telah menjadi tunggak utama di dalam pendekatan feminisme.

 Dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang diciptakan Allah SWT berdasarkan kodrat. “*Sesungguhnya segala sesuatu Kami ciptakan dengan qadar*” (QS. al-Qamar [54]: 49). Para pakar mengartikan *qadar* di sini dengan ukuran-ukuran, sifat-sifat yang ditetapkan Allah SWT bagi segala sesuatu, dan itu dinamakan kodrat. Dengan demikian, laki-laki dan perempuan sebagai individu dan jenis kelamin memiliki kodratnya masing-masing. Syeikh Mahmud Syaltut mengatakan bahwa tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan berbeda, namun dapat dipastikan bahwa Allah SWT lebih menganugerahkan potensi dan kemampuan kepada perempuan sebagaimana telah menganugerahkannya kepada laki-laki. Ayat al-Quran yang populer dijadikan rujukan dalam pembicaraan tentang asal kejadian perempuan adalah firman Allah dalam QS. an-Nisa’[4] ayat 1,”*Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu, yang telah menciptakan kamu dari diri (nafs) yang satu, dan darinya Allah menciptakan pasangannya dan keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak*.”

 Yang dimaksud dengan *nafs* di sini menurut banyak ulama adalah Adam dan pasangannya adalah istri beliau yakni Hawa. Pandangan ini kemudian telah melahirkan pandangan negatif kepada perempuan dengan menyatakan bahwa perempuan adalah bagian laki-laki. Tanpa laki-laki perempuan tidak ada, dan bahkan tidak sedikit di antara mereka berpendapat bahwa perempuan (Hawa) diciptakan dari tulang rusuk Adam. Kitab-kitab tafsir terdahulu hampir bersepakat mengartikan demikian. Kitab-kitab tafsir mu'tabar dari kalangan jumhur seperti Tafsir al-Qurthubi, Tafsir al-Mizan, Tafsir Ibn Katsir, Tafsir al-Bahr al-Muhith, Tafsir Ruh al-Bayan, Tafsir al-Kasysyaf, Tafsir al-Sa'ud, Tafsir Jami al-Bayan an Tafsir al-Maraghi, semuanya menafsirkan kata *nafs al-wahidah* dengan Adam, dan dhamir *minha* ditafsirkan dengan "dari bagian tubuh Adam", dan kata *zawj* ditafsirkan dengan Hawa, isteri Adam. Ulama lain seperti Abu Muslim al-Isfahani, sebagaimana dikutip al-Razi dalam tafsirnya (Tafsir al-Razi), mengatakan bahwa dlamir *"ha"* pada kata minha bukan dari bagian tubuh Adam tetapi "dari *jins* (gen), unsur pembentuk Adam". Pendapat lain dikemukakan oleh ulama Syi'ah yang mengartikan *al-nafs al-wahidah* dengan *"ruh"* (soul).[[20]](#footnote-20) Kalaupun pandangan di atas diterima yang mana asal kejadian Hawa dari rusuk Adam, maka harus diakui bahwa ini hanya terbatas pada Hawa saja, karena anak cucu mereka baik laki-laki maupun perempuan berasal dari perpaduan sperma dan ovum. Allah menegaskan hal ini dalam QS. Ali Imran [3]: 195, “*Sebagian kamu adalah bahagian dari sebagian yang lain*”. Ayat ini mengandung makna bahwa sebahagian kamu (laki-laki) berasal dari pertemuan ovum perempuan dan sperma laki-laki dan sebagian yang lain (yakni perempuan) demikian juga halnya.

 Adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak dapat disangkal karena memiliki kodrat masing-masing. Perbedaan tersebut paling tidak dari segi biologis. Al-Quran mengingatkan, “*Janganlah kamu iri hati terhadap keistimewaan yang dianugerahkan Allah terhadap sebagian kamu atas sebagian yang lain. Laki-laki mempunyai hak atas apa yang diusahakannya dan perempuan juga mempunyai hak atas apa yang diusahakannya*”(QS. An-Nisa’ [4]: 32). Ayat ini mengisyaratkan perbedaan, dan bahwa masing-masing memiliki keistimewaan. Walaupun demikian, ayat ini tidak menjelaskan apa keistimewaan dan perbedaan itu. Namun dapat dipastikan bahwa perbedaan yang ada tentu mengakibatkan fungsi utama yang harus mereka emban masing-masing. Di sisi lain dapat pula dipastikan tiada perbedaan dalam tingkat kecerdasan dan kemampuan berfikir antara kedua jenis kelamin itu. Al-Quran memuji *ulul albab* yaitu yang berzikir dan memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Zikir dan pikir dapat mengantar manusia mengetahui rahasia-rahasia alam raya. *Ulul albab* tidak terbatas pada kaum laki-laki saja, tetapi juga kaum perempuan, karena setelah al-Quran menguraikan sifat-sifat ulul albab ditegaskannya bahwa “*Maka Tuhan mereka mengabulkan permintaan mereka dengan berfirman; “Sesungguhnya Aku tidak akan menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik lelaki maupun perempuan*”. (QS. Ali Imran [3]: 195). Ini berarti bahwa kaum perempuan sejajar dengan laki-laki dalam potensi intelektualnya, mereka juga dapat berpikir, mempelajari kemudian mengamalkan apa yang mereka hayati dari zikir kepada Allah serta apa yang mereka pikirkan dari alam raya ini.

 Jenis laki-laki dan perempuan sama di hadapan Allah. Memang ada ayat yang menegaskan bahwa “*Para laki-laki (suami) adalah pemimpin para perempuan (istri)”* (QS. an-Nisa’ [4]: 34), namun kepemimpinan ini tidak boleh mengantarnya kepada kesewenang-wenangan, karena dari satu sisi al-Quran memerintahkan untuk tolong menolong antara laki-laki dan perempuan dan pada sisi lain al-Quran memerintahkan pula agar suami dan istri hendaknya mendiskusikan dan memusyawarahkan persoalan mereka bersama.

 Sepintas terlihat bahwa tugas kepemimpinan ini merupakan keistimewaan dan derajat tingkat yang lebih tinggi dari perempuan. Bahkan ada ayat yang mengisyaratkan tentang derajat tersebut yaitu firmanNYA, “*Para istri mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf, akan tetapi para suami mempunyai satu derajat/tingkat atas mereka (para istri)”* (QS. al-Baqarah [2]: 228). Kata *derajat* dalam ayat di atas menurut Imam Thabary adalah kelapangan dada suami terhadap istrinya untuk meringankan sebagian kewajiban istri. Al-Quran secara tegas menyatakan bahwa laki-laki bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, karena itu, laki-laki yang memiliki kemampuan material dianjurkan untuk menangguhkan perkawinan. Namun bila perkawinan telah terjalin dan penghasilan manusia tidak mencukupi kebutuhan keluarga, maka atas dasar anjuran tolong menolong yang dikemukakan di atas, istri hendaknya dapat membantu suaminya untuk menambah penghasilan.

 Jika demikian halnya, maka pada hakikatnya hubungan suami dan istri, laki-laki dan perempuan adalah hubungan kemitraan. Dari sini dapat dimengerti mengapa ayat-ayat al-Quran menggambarkan hubungan laki-laki dan perempuan, suami dan istri sebagai hubungan yang saling menyempurnakan yang tidak dapat terpenuhi kecuali atas dasar kemitraan. Hal ini diungkapkan al-Quran dengan istilah *ba’dhukum mim ba’dhi* – sebagian kamu (laki-laki) adalah sebahagian dari yang lain (perempuan). Istilah ini atau semacamnya dikemukakan kitab suci al-Quran baik dalam konteks uraiannya tentang asal kejadian laki-laki dan perempuan (QS. Ali Imran [3]: 195), maupun dalam konteks hubungan suami istri (QS. an-Nisa’[4] : 21) serta kegiatan-kegiatan sosial (QS. at-Taubah [9]: 71). Kemitraan dalam hubungan suami istri dinyatakan dalam hubungan timbal balik: “*Istri-istri kamu adalah pakaian untuk kamu (para suami) dan kamu adalah pakaian untuk mereka*” (QS. al-Baqarah [2]: 187), sedang dalam keadaan sosial digariskan: “*Orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain, mereka menyuruh (mengerjakan yang ma’ruf) dan mencegah yang munkar”* (QS. at-Taubah [9]: 71).Pengertian menyuruh mengerjakan yang ma’ruf mencakup segi perbaikan dalam kehidupan, termasuk memberi nasehat/saran kepada penguasa, sehingga dengan demikian, setiap laki-laki dan perempuan hendaknya mampu mengikuti perkembangan masyarakat agar mampu menjalankan fungsi tersebut atas dasar pengetahuan yang mantap. Mengingkari pesan ayat ini, bukan saja mengabaikan setengah potensi masyarakat, tetapi juga mengabaikan petunjuk kitab suci.

 Al-Qur’an sebagai rujukan prinsip masyarakat Islam, pada dasarnya mengakui bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama. Keduanya diciptakan dari satu *nafs (living entity)*, di mana yang satu tidak memiliki keunggulan terhadap yang lain. Dengan kata lain, laki-laki memiliki hak dan kewajiban terhadap perempuan dan sebaliknya perempuan memiliki hak dan kewajiban terhadap laki-laki. Persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan selain dalam hal pengambilan keputusan, juga dalam hak ekonomi, yakni untuk memiliki harta kekayaan dan tidaklah suami atau bapaknya boleh mencampuri hartanya. Kekayaan itu baik yang didapatkan dari pewarisan ataupun harta yang diusahakannya sendiri. Namun mengapa muncul pemikiran dan pemahaman yang kemudian menjadi tradisi bahwa perempuan seolah-olah berada dibawah laki-laki? Hal ini terjadi antara lain karena pengaruh kultur Timur Tengah pada abad pertengahan. Sheikh Nefzawi, seorang penulis muslim yang mewakili kultur pada zamannya menjelaskan tipe ideal kaum perempuan di masa itu adalah perempuan yang selalu berada di dalam rumah dan perempuan yang menyerahkan dirinya kepada suaminya tanpa membantah sedikitpun (Sheikh Nefzawi, 1964: 97).[[21]](#footnote-21) Kultur semacam ini di sebagian masyarakat Islam masih dilanggengkan, namun di sebagian masyarakat yang lain sudah tidak berlaku.

 Selain itu, tidak dapat dipungkiri bahwa tafsir keagamaan juga memegang peranan penting dalam melegitimasi dominasi atas kaum perempuan. Terdapat beberapa buku atau kitab yang dijadikan rujukan umat Islam selama ini yang masih terpengaruh dengan kultur yang bersifat patriarki. Oleh karena itu, diperlukan metode pendekatan penafsiran ayat-ayat al-Qur’an yang bisa digunakan untuk memahami bagaimana ajaran moral agama yang bersifat prinsipil dengan menggunakan analisis sosial. Pada dasarnya, dalil-dalil yang ada dalam al-Qur’an terdiri dari dua bagian, yaitu yang bersifat mutlak dan tidak bisa ditafsirkan lebih daripada satu *(qoth’i al-dalalah)*, dan yang dalil-dalil yang bisa dan boleh menimbulkan tafsiran *(dhann al-dalalah).* Maka dalil-dalil yang bersifat dhanni inilah yang memerlukan pisau analisis yang diambil juga dari ilmu-ilmu dalam bidang lain dalam memahaminya, termasuk juga meminjam pisau analisis gender. Dengan demikian, pemahaman atau tafsiran terhadap ajaran keadilan prinsip dasar agama akan berkembang sesuai dengan pemahaman atas realitas sosial, karena sesungguhnya prinsip dasar seruan agama Islam untuk menegakkan keadilan tetap relevan. Maka penafsiran terhadap dalil yang bersifat *dhanniyah* dengan menggunakan analisis dan perspektif gender perlu dilakukan. Implikasi dari penafsiran tersebut adalah kemungkinan dilakukannya rekonstruksi fikih yang merupakan landasan prilaku keseharian umat Islam. Tafsir dan fikih perempuan, yakni bukan saja tafsir dan fikih yang dilahirkan oleh kaum perempuan sendiri, melainkan juga tafsir dan fikih yang telah menggunakan analisis dan perspektif gender (Mansour Fakih, 1996: 136).

 Gagasan yang dikeluarkan oleh Mansour Fakih di atas merupakan satu gagasan yang cemerlang dalam usaha membongkar tradisi-tradisi patriarki yang banyak mempengaruhi dogma dan pemahaman umat Islam terhadap perempuan. Namun hal ini tidaklah mudah karena budaya patriarki dengan disadari ataupun tidak telah mengakar kuat dalam pemahaman masyarakat kita sehingga kini. Oleh karena itu, untuk merealisasikan gagasan fikih berperspektif gender memerlukan perjalanan dan perjuangan yang gigih, karena dianggap menggugat fikih yang telah mapan sekian lama. Dan salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah dengan cara meyakinkan para pengajar (termasuk kiai) yang ada di kalangan masyarakat tentang perlunya merobohkan budaya patriarki untuk mewujudkan fikih yang berperspektif gender.

 Lebih lanjut Fakih (1996: 138) menyatakan bahwa dalam menekuni persoalan-persoalan gender, ada beberapa permasalahan tafsiran keagamaan yang dianggap strategis agar segera mendapat perhatian untuk dilakukan kajian. *Pertama*, yang menyangkut persoalan subordinasi kaum perempuan akibat penafsiran kaum perempuan dalam kedudukan dan martabat yang tidak subordinatif terhadap kaum laki-laki. Padahal pada dasarnya semangat hubungan laki-laki dan perempuan dalam Islam bersifat adil *(equal).* Oleh karena itu, subordinasi kaum perempuan merupakan suatu keyakinan yang berkembang di masyarakat yang tidak sesuai atau bertentangan dengan semangat keadilan sebagaimana dalam al-Qur’an QS. al-Hujurat [49]: 14 yang berarti: Sesungguhnya telah Aku ciptakan kalian laki-laki dan perempuan dan Aku jadikan kalian berbangsa dan bersuku-suku agar kalian lebih saling mengenal; sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa.[[22]](#footnote-22) *Kedua,* pemahaman yang bias gender selain meneguhkan subordinasi kaum perempuan, juga membawa akibat pada persoalan waris dan kesaksian, di mana nilai kaum perempuan dianggap separoh dari kaum laki-laki. Untuk membahas ini perlu dilakukan analisis konteks sosial terhadap struktur sosio-kultural pada saat ayat tersebut diturunkan, sehingga pemahaman masalah waris dan kesaksian tidak bertentangan dengan prinsip keadilan yang disampaikan ayat-ayat di atas. *Ketiga*, segenap ayat yang berkenaan dengan hak produksi dan reproduksi kaum perempuan. Dalam tradisi penafsiran Islam yang tidak menggunakan perspektif gender, kaum perempuan sama sekali tidak mempunyai hak reproduksi maupun reproduksi yakni untuk mengontrol organ reproduksi mereka. Untuk itu, usaha untuk menafsirkan kembali agar terjadi keadilan gender dalam hak-hak reproduksi perlu mendapat perhatian.

 Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peran tradisi dan penafsiran agama mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam melanggengkan ketidakadilan gender maupun sebaliknya, yaitu dalam usaha menegakkan keadilan gender. Terlebih untuk konteks masyarakat Indonesia yang sangat kental diwarnai dan dipengaruhi tradisi dan ajaran islam. Analisis ini tentunya tidak terlepas dari fakta bahwa cukup banyak ditemukan tradisi dan ajaran Islam yang sangat mungkin dipahami sebagai bentuk-bentuk marginalisasi dan subordinasi kaum perempuan. Dan yang tidak kalah penting juga bahwa penyampai ajaran agama kepada masyarakat, baik guru, ustadz, penceramah maupun kiai juga memegang peranan yang sangat penting karena merekalah yang bertanggung jawab untuk menyampaikan pesan-pesan agama kepada masyarakat. Apabila mereka telah menyadari keadilan gender yang sebenarnya, maka mereka dapat menjadi penyeimbang terhadap doktrin-doktrin agama yang mengandung ketidakadilan gender. Dan sebaliknya, apabila mereka tidak memahami konsep keadilan gender dengan sebenarnya, maka mereka akan ”diam” bahkan mendukung berlangsungnya ketidakadilan gender di kalangan masyarakat.

 Dan di antara wujud usaha untuk menghapuskan, atau paling tidak meminimalkan ketidakadilan gender adalah dengan cara melakukan gerakan pemberdayaan kaum perempuan. Pemberdayaan perempuan adalah sebuah langkah untuk menjadikan perempuan lebih maju. Menurut Husein Muhammad (2004: 314-316), bahwa realitas ketidakadilan bagi kaum perempuan jika dikaitkan dengan gerakan pemberdayaan kaum perempuan, maka ada dua hal yang harus dilakukan: *Pertama*, reinterpretasi teks yaitu untuk membangun basis teoritis bagi pemahaman dan tradisi baru yang lebih berkeadilan serta selaras dengan pesan-pesan substansial Islam untuk memuliakan kaum wanita dan *kedua,* sosialisasi keadilan gender.

 Langkah pertama, sekalipun bersifat teoritis, jelas menyimpan tingkat kerumitan dan risiko tersendiri. Namun, dalam konteks masyarakat Islam di Indonesia, langkah tersebut merupakan kebutuhan mutlak dan tak terhindarkan. Masyarakat jelas membutuhkan panduan dalam beragama, termasuk dalam persoalan yang berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan, maupun yang berkaitan dengan posisi sosial kaum perempuan. Salah satu contoh reinterpretasi adalah berkenaan dengan subordinasi kaum perempuan di bawah dominasi (kepemimpinan) laki-laki. Ayat ”Kaum lelaki adalah *qawwam* bagi kaum perempuan.....” (QS. an-Nisa [3]: 34), seringkali dipahami sebagai indikator bagi superioritas kaun lelaki. Kebanyakan mufassir menyebutkan bahwa superioritas ini bersifat mutlak. Az-Zamakhsari misalnya, menyebutkan bahwa laki-laki memang lebih unggul daripada kaum perempuan. Keunggulan itu melibatkan akal (*al-aql*), ketegasan (*al-hazm*), semangat (*al-’azm*), keperkasaan (*al-quwwah*), dan keberanian atau ketangkasan (*al-furusiyyah wa ar-ramy*). Sementara sl-Razi menyebutkan bahwa keunggulan kaum lelaki meliputi dua hal: ilmu pengetahuan pikiran akal (*al-’ilm*) dan kemampuan (*al-qudrah*). Artinya, akal dan pengetahuan lelaki melebihi perempuan, dan untuk pekerjaan keras laki-laki lebih sempurna.

 Akan tetapi, jika kita mengamati realitas secara jenih, superioritas sekelompok orang termasuk kaum lelaki atas kaum perempuan tidaklah berlaku umum dan mutlak. Saat ini, bisa menemukan kenyataan bahwa tidak setiap laki-laki pasti lebih berkualitas dari kaum perempuan. Seiring dengan berbagai perubahan sosial, kini banyak juga ditemukan banyak kaum perempuan yang memiliki keunggulan pemikiran dan pengetahuan dibandingkan laki-laki. Dan tak jarang mereka pun memegang peran-peran publik secara lebih baik daripada laki-laki. Dengan kata lain, superioritas kaum lelaki sebagaimana ditunjukkan oleh ayat di atas lebih didasarkan pada realitas sosial pada saat itu, dimana memang berbagai infrastruktur sosial dan budaya lebih memungkinkan laki-laki untuk mendominasi dan memegang peranan. Ketika kemudian sejarah berubah, maka berubah pulalah landasan sosiologis dan kultural yang menjadi basis bagi kita untuk memahami ayat tersebut.

 Dengan demikian, ayat tersebut mesti dipahami secara kontekstual. Posisi kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga, sebenarnya muncul dalam masyarakat patriarki, di mana ketergantungan perempuan kepada laki-laki dalam masalah ekonomi dan keamanan sedemikian kuat. Sehingga, penempatan perempuan pada posisi subordinasi laki-laki pada suatu waktu tertentu, memang bisa jadi tepat karena membawa kemaslahatan. Tetapi, prinsip kemaslahatan ini pulalah yang membuat kita bisa memaknai ayat tersebut secara berbeda seiring dengan perubahan waktu. Makna kemaslahatan dan sebab kemaslahatan jelas tidak statis, melainkan dinamis. Ketika ternyata pada saat ini kepemimpinan kaum perempuan lebih membawa kemaslahatan, maka tentu saja kita tidak bisa berpegang pada bunyi lahiriah ayat tersebut. Terlebih lagi redaksi ayat tersebut datang dalam bentuk narasi (*ikhbar*), yang dalam disiplin ilmu *ushul fiqh* diposisikan sebagai pemberitaan yang tidak mengindikasikan suatu ajaran (perintah agama).

 Untuk melengkapi langkah yang bersifat teoritis yang berbentuk reinterpretasi ajaran ini, Husein (*ibid*.: 317) menjelaskan bahwa diperlukan juga adanya langkah-langkah praktis berupa sosialisasi keadilan gender, atau dalam bahasa yang kini populer adalah *gender mainstreaming* (pengarusutamaan gender). Melalui langkah strstegis ini, penyadaran akan berbagai bentuk ketidakadilan gender yang kini banyak terjadi di masyarakat, harus terus dilakukan. Demikian pula langkah-langkah taktis untuk meningkatkan peran publik perempuan, termasuk penempatan perempuan dalam simpul-simpul pengambilan kebijakan publik. Betapapun, perempuan adalah setengah dari masyarakat kita. Alangkah lemahnya masyarakat kita jika ternyata setengah dari dirinya tidak dapat berfungsi secara optimal karena beberapa kendala. Sebaliknya, kita bisa banyak berharap jika ternyata kaum perempuan juga turut mengambil peranan dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera, sebagaimana kini dilakukan oleh kaum lelaki.

**3.2 Kiai dan Pemberdayaan Perempuan di Kalangan Pesantren**

Sebagaimana dijelaskan di atas, pembahasan tentang tema perempuan tidak hanya terbatas pada lingkup wacana, tetapi sudah merambah pada wilayah implementasi. Hampir setiap negara Islam, misalnya, telah memiliki kementrian yang melakukan berbagai program pemberdayaan perempuan. Di Indonesia, misalnya, terdapat ”Kantor Kementrian Pemberdayaan Perempuan”, sedangkan di Bangladesh terdapat ”Ministry of Social Welfare and Women’s Affairs” (Naila Kabeer, 1991: 130). Perbincangan mengenai gender dan pemberdayaan perempuan ini juga telah memasuki wilayah agama. Hal ini karena pemahaman tentang gender dan pemberdayaan perempuan tidak terlepas dari doktrin-doktrin agama yang telah memberikan warna yang cukup signifikan dalam menciptakan konstruksi sosial dalam kaitannya dengan relasi laki-laki dan perempuan. Dan terwujudnya warna-warna pemahaman ini tidak terlepas dari sang penyampai ajaran atau doktrin itu sendiri, yaitu para tokoh agama atau ulama. Dan di Indonesia, ulama, terutama ulama pesantren/kiai merupakan salah satu pusat dialektika perubahan masyarakat.[[23]](#footnote-23) Pandangan umum masyarakat Indonesia terhadap sosok kiai menunjukkan bahwa kiai adalah contoh panutan dan pembawa missi kenabian. Di tangan kiai tergenggam dua otoritas keagamaan yaitu penafsir teks-teks agama dan penjaga moral agama. Dengan demikian, maka apa yang keluar dari sosok kiai merupakan sebuah kebenaran yang tidak boleh dibantah. Sikap dan perilaku hidup kiai menjadi contoh dan rujukan masyarakat.

 Istilah gender di kalangan para kiai adalah istilah yang baru dan masih sangat asing. Kebanyakan para kiai ”alergi” dengan istilah ini karena kebetulan istilah ini diadopsi dari bahasa Inggris yang notabene merupakan negara bukan Islam. Kondisi ini secara tidak disadari menimbulkan kecurigaan-kecurigaan para kiai terhadap konsep gender itu sendiri itu. Mereka kebanyakan menganggap bahwa gender akan mengajarkan para perempuan untuk tidak taat kepada suaminya, mengajarkan perempuan untuk selalu keluar rumah, dan lain-lain. Para aktivis perempuan sudah berusaha mencari kata persamaannya dalam bahasa Arab dengan harapan dapat menarik simpatik para kiai, antara lain adalah dengan istilah *fiqh al-nisa’* untuk lebih menarik simpati para kiai. Husein (2004: 321) menyatakan bahwa sepanjang pengalaman beliau mensosialisasikan isu-isu Islam dan gender di hadapan para ulama, respon pertama yang diperlihatkan mereka adalah kecurigaan-kecurigaan. Kecurigaan pada misi yang dibawa, kecurigaan pada upaya isteri untuk melawan suami, dan sebagainya.

 Pandangan para kiai yang demikian ini adalah wajar, karena pada kenyataannya, kitab-kitab klasik yang merupakan rujukan mereka selama ini, baik dalam bidang tafsir maupun fiqh adalah teks-teks agama yang kebanyakannya masih bias gender. Untuk memahami kondisi ini, kita harus melihat kembali sejarah bahwa agama Islam turun di daerah Arab yang pada saat itu kondisi perempuan sangat tidak dihargai. Selain itu, al-Qur’an turun dengan ”meminjam” bahasa Arab yang juga bias gender. Oleh karena itu, tidak dapat dihindari apabila teks-teks kitab klasik masih terbelenggu dengan bahasa dan budaya yang bias gender juga. *Lisan al-’Arab* yang merupakan kamus rujukan utama kebanyakan para ahli tafsir dan fiqh, apabila kita teliti kembali akan banyak ditemukan penerjemahan yang bias gender.

 Oleh karena itu, memperjuangkan hak-hak perempuan di kalangan pesantren bukanlah satu hal yang mudah, karena pesantren pada kenyataannya masih di selomuti oleh referensi-referensi yang masih bias gender. Mengubah kurikulum yang ada di pesantren tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perlu kehati-hatian dan kekuatan lahir dan batin dalam menjalankannya, karena merubah apa yang sudah berjalan di pesantren sama halnya membunyikan genderang perang dengan para kiai dan pengasuh pesantren yang notabene masih belum semuanya memahami konsep gender dalam Islam dengan benar.

 Pemberdayaan perempuan di kalangan pesantren tidak akan dapat terwujud apabila konsep dasar dari perempuan dan hak-haknya belum bisa dipahami dengan menyeluruh dan benar. Pemberdayaan perempuan akan bisa dilakukan jika pemahamn dasar terhadap posisi perempuan dalam Islam dan hak-haknya sudah dapat dipahami secara utuh. Dan inilah salah satu tugas dari tokoh agama dan masyarakat, kiai, kiai perempuan dan setiap individu untuk secara bersama-sama memperjuangkan perempuan dan melakukan pemberdayaan terhadap perempuan.

**3.3 KH. Muhyiddin Abdusshomad dan Pembaharuan terhadap Perempuan di Kalangan Pesantren**

Nama KH. Muhyidddin Abdusshomad adalah nama yang tidak asing dalam literatur Islam dan Gender, karena beliau adalah salah satu kiai di Indonesia yang gigih memperjuangkan kesetaraan perempuan di kalangan pesantren khususnya, dan dikalangan masyarakat pada umumnya. Perjuangan beliau tidaklah mudah, karena apa yang beliau perjuangkan adalah membela kaum perempuan di kalangan pesantren yang berarti harus berhadapan dengan para kiai sebagai pengasuh pesantren. Padahal dalam kenyataan yang terjadi, masih banyak kiai yang belum setuju dengan konsep kesetaraan gender yang beliau perjuangkan.

 Namun demikian, beliau tidak menyerah dan pantang mundur untuk terus memperjuangkan konsep kesetaraan gender terhadap para kiai di sekitarnya. Menurut beliau, hal itu tidak tidak mudah dilakukan. Ini karena para kiai telah mapan dengan literatur yang dipeganginya selama ini, dan mereka tidak mau ”tergugat” posisinya dikarenakan adanya konsep kesetaraan gender. Menurut beliau, perjuangannya memerlukan waktu yang tidak sebentar dan memerlukan dukungan dari beberapa pihak untuk dapat berhasil. Oleh karena itu, beliau berharap adanya kerja sama di antara semua pihak untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap perempuan.

**3.3.1 Kiprah KH. Muhyiddin Abdusshomad sebagai Pejuang Perempuan**

Istilah pejuang merupakan satu istilah yang memberikan arti sebuah pengorbanan. Dan pengorbanan yang dilakukan oleh KH. Muhyiddin Abdusshomad sebagai pejuang perempuan adalah satu pengorbanan yang tidak dapat dipandang sebelah mata. Beliau dengan gigihnya telah melakukan berbagai cara untuk melawan tradisi patriarki yang telah mendarah daging di kalangan masyarakat kita, khususnya di kalangan pesantren. Selain mengadakan beberapa seminar dan work shop tentang perempuan di kalangan pesantrennya, beliau juga aktif bergabung dengan lembaga Rahima yang merupakan salah satu LSM yang berkecimpung dalam dunia perempuan. Bahkan beliau telah menerbitkan buku Pendidikan Agama Islam untuk SMA/SMK Kelas XII yang di dalamnya banyak memuat pesan-pesan kesetaraan gender.

 Sebagai contoh adalah, dalam buku tersebut dijelaskan bahwa dalam memahami QS. al-Nisa’ [4]: 34 mengenai konsep *qawwamun* bagi perempuan, bahwa kata *qawwam* memiliki beragam pendapat. Sebagian ahli tafsir seperti al-Qurthubi, Ibnu Katsir, al-Hijazi, al-Shabuni dan lainnya mengatakan bahwa arti *qawwam* adalah pemimpin, penguasa, hakim, dan pendidik. Pendapat lain mengatakan bahwa yang dimaksud *qawwam* adalah penopang (kehidupan). Riffat Hasan, seorang ulama perempuan dari Pakistan mengatakan bahwa makna dari kata itu adalah pencari nafkah atau mereka yang menyediakan sarana pendukung kehidupan.

 *Qawwam* dalam al-Qur’an pada umumnya ditafsirkan sebagai hak laki-laki dengan anggapan bahwa ada kelebihan yang pada umumnya dimiliki laki-laki, misalnya masalah emosi psikologis dan semacamnya. Juga karena pada umumnya laki-laki yanag memberikan nafkah kepada istrinya. Ini terjadi pada umumnya, terlebih pada saat al-Qur’an diturunkan. Namun bila dalam kenyataan hidup sehari-hari yang terjadi adalah sebaliknya, misalnya suami sedang mengalami kesulitan ekonomi akibat usaha yang sedang bangkrut atau terkena pemutusan hubungan kerja, dan sebagainya, atau kondisi psikologis yang tidak stabil, maka hilang atau beralihlah *qawwam* itu dari pihak laki-laki. Dan ketika itu, istri bisa mengambil peran tersebut dalam rumah tangga. Pada kenyataannya, banyak perempuan yang kemudian menjadi kepala keluarga karena perceraian, atau ditinggal mati suaminya. Mereka mengasuh dan membesarkan anak-anaknya hingga dewasa (Nur Achmad (ed.), 2010: 76).

 Dari pendapat di atas dapat dilihat bahwa KH. Muhyiddin bersikap terbuka terhadap makna kata *qawwam* yang selama ini oleh sebagian kiai dijadikan ”senjata” untuk melarang atau membatasi kaum perempuan untuk menjadi pemimpin ataupun melakukan kegiatan di luar rumah. Beliau juga terlihat bersikap adil dan tidak harga mati dalam melihat dan menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an, atau dalam bahasa lain adalah beliau menafsirkan al-Qur’an secara kontekstual.

 Demikian juga dalam mensikapi fenomena kekerasan dalam rumah tangga, beliau menjelaskan bahwa sebagai umat Islam kita seharusnya mengikuti teladan yang diberikan oleh Rasulullah, termasuk dalam hal bersikap dalam kehidupan rumah tangga. Beliau mengutip sebuah hadith yang menjelaskan bahwa Rasulullah berpesan kepada salah seorang sahabat yang bertanya mengenai bagaimana bersikap dalam rumah tangga, Rasulullah menjawab bahwa sebagai seorang suami hendaknya memberikan makanan kepada istrinya seperti yang dimakannya, memberi pakaian kepada istrinya seperti yang dipakainya, dan Rasulullah berpesan juga agar tidak memukul dan menghina (melecehkan) istri. Beliau juga menjelaskan bahwa dalam menghadapi masalah rumah tangga, jalan keluarnya adalah dengan mencarikan solusi terbaik dan bukan dengan cara menggunakan kekerasan. Rasulullah tidak menggunakan jalan kekerasan untuk membuat istri-istri beliau patuh.[[24]](#footnote-24)

 Hal ini senada dengan apa yang beliau sampaikan dalam tulisan beliau "Kekerasan dalam Rumah Tangga?" yang mengupas bagaimana perempuan di Indonesia yang masih banyak mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan mereka tidak berani untuk memberontak dikarenakan takut dikatakan sebagai istri yang durhaka. Beliau menjelaskan bahwa, dalam Islam tidak mengenal adanya kekerasan dalam rumah tangga. Hubungan antara suami dan istri menurut ajaran Islam harus dilandaskan oleh *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik dan sukarela), bahkan sampai pada urusan hubungan badan antara suami dan istri. Semua harus berdasarkan pada hubungan yang baik dan sukarela serta tidak ada pemaksaan di antara kedua belah pihak. Apabila prinsip ini dijalankan dalam kehidupan rumah tangga, maka kekerasan dalam rumah tangga akan bisa dihindari dan hubungan yang terjalin di antara semua anggota keluarga akan harmonis sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw.

 Menurut beliau juga, berangkat dari prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* dan anjuran berbuat baik kepada istri, yakni dengan tidak melukai hatinya, tidak menyakiti fisiknya, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw, juga dengan memahami muatan kata *"libas"* pada al Qur'an surat al Baqoroh ayat 187 yang berarti saling melindungi dalam segala persoalan, maka harus diupayakan penyesuaian dan penyamaan sikap termasuk dalam masalah hubungan seksual antara suami dan istri harus dilakukan dengan penuh kerelaan dan tidak ada keterpaksaan diantara kedua belah pihak. Sedangkan memaksa berhubungan seksual kepada istri aau sebaliknya itu bertendensi *idza'* (menyakiti) salah satu pihak. Hal tersebut tentu merupakan perbuatan haram.[[25]](#footnote-25)

 Sedangkan dalam menganggapi fenomena kebelakangan ini, dimana perempuan dari lingkungan pesantren yang mulai banyak menunjukkan kemajuannya terkait posisi dan hak-hak mereka, KH.Muhyiddin berpendapat bahwa pencapaian perempuan sampai pada tahap sekarang ini tidak lepas dari usaha orang-orang yang mempunyai kesadaran kesetaraan gender. Para tokoh penggerak itu antara lain adalah KH. Masdar, Lies Marcoes, ibu Sinta Nuriyah, Farcha Ciciek dan dengan adanya beberapa LSM yang bergerak dalam bidang perempuan seperti P3M, Rahima, Fahmina, Puan Amal Hayati, dan lain-lain. Mereka bekerja keras lebih dari sepuluh tahun, melakukan halaqah, pelatihan, tadarus, seminar, yang semua itu sangat berpengaruh dalam mengubah pola pikir perempuan pesantren.[[26]](#footnote-26)

**3.3.2 KH. Muhyiddin Abdusshomad dan Pemberdayaan Perempuan di Kalangan Pesantren**

Berbicara mengenai pemberdayaan perempuan di kalangan pesantren memang tidak dapat dipisahkan dengan sosok seorang kiai. Hal ini karena kiai bukan saja sebagai seorang pemimpin pesantren, namun karena kiai juga merupakan pembimbing, pemberi nasehat dan tempat bertanya berbagai persoalan tentang agama. Menurut KH. Muhyiddin Abdusshomad, pemahaman terhadap posisi perempuan di kalangan umat Islam sendiri masih perlu diperkokoh. Bahwa manusia diciptakan dengan derajat yang sama antara laki-laki dan perempuan, tidak ada yang membedakannya selain ketakwaan kepada Allah SWT. Pernyataan ini adalah berdasarkan al-Qur’an dan Hadith dan bukan berdasarkan asumsi orang Barat. Menurut beliau, masih banyak yang masih benar-benar memahami hal ini sehingga terjadinya ketimpangan sosial antara laki-laki dan perempuan. Perempuan dianggap subordinat dan banyak mengalami ketidakadilan akibat kesalahapahaman memahami posisinya yang sebenarnya.

 Selain itu, menurut KH. Muhyiddin juga menyatakan bahwa realitas sosial yang terjadi di masyarakat, pesantren yang identik dengan Nahdlatul Ulama masih melanggengkan budaya bahwa yang berhak tampil ke depan adalah ”anak kiai” karena anak kiai adalah keturunan darah biru. Yang berhak meneruskan perjuangan seorang kiai adalah anak beliau sendiri, meskipun pada kenyataannya, misalnya, anak kiai kurang menguasai ilmu-ilmu agama dengan mendalam, tapi tetap anak kiai-lah yang akan meneruskan perjuangan orang tuanya. Hal ini juga mengakibatkan nilai-nilai yang ditularkan kepada para santrinya terkadang kurang utuh sehingga menimbulkan kesalahpahaman.

 Berbagai usaha telah dilakukan oleh KH. Muhyiddin untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan di kalangan pesantren yang diasuhnya, antara lain adalah dengan mengadakan workshop tentang tema-tema perempuan dengan bekerja sama dengan P3M, Fatayat dan juga Rahima. Selain itu, beliau juga telah menerbitkan buku kurikulum Pendidikan Agama Islam yang di dalamnya juga memuat informasi-informasi tentang posisi perempuan yang sebenarnya dalam Islam. Usaha yang dilakukan beliau diterapkannya kepada para guru dan juga santri dan siswa yang berada di lingkungan pesantren yang diasuhnya.

 Namun demikian, diakui beliau tidak mudah untuk mewujudkan pemberdayaan perempuan di kalangan pesantren karena mengalami beberapa kendala. Antara lain adalah menghadapi kiai-kiai sepuh yang kebanyakannya masih belum bisa menerima konsep pemberdayaan perempuan. Selain itu, memerlukan satu usaha yang kuat untuk menembus kemapanan para kiai selama ini. Posisi kiai (=laki-laki) yang selama ini dilaluinya adalah posisi yang menguntungkan bagi mereka. Maka untuk mengubahnya diperlukan usaha yang sulit dikarenakan mengubah posisi yang sudah mapan dan sudah nyaman ke tempat yang kurang nyaman. Ditambah lagi kebanyakan para kiai kurang mau membaca buku-buku baru dan mereka berpegang kuat hanya pada buku-buku produk lama. Hal ini akan menguatkan lagi pemahaman mereka terhadap teks-teks lama yang sebagiannya masih bias gender. Kebanyakan para kiai sudah anti terlebih dulu dengan pemberdayaan perempuan dan menganggap hal itu adalah berasal dari dunia Barat dan bukan ajaran Islam.

 Pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh KH. Muhyiddin juga dilakukannya melalui sekolah/madrasah yang di asuhnya. Di antaranya adalah melalui MTS. Unggulan Nurul Islam. Sekolah ini mempunyai tenaga pengajar sejumlah 25 orang dengan perincian 14 orang guru perempuan dan 11 orang guru laki-laki. Kepala sekolah madrasah ini juga perempuan, yaitu Hj. Hodaifah S.Ag. Dapat dilihat bahwa KH. Muhyiddin telah memberikan kesempatan kepada perempuan untuk menjadi pemimpin madrasah ini. Selain itu, ketua pengelola perpustakaan, pengelola laboratorium biologi dan kimia masing-masing dipegang oleh guru perempuan. Adapun visi madrasah ini adalah Terbentuknya siswa yang unggul prestasi berdasarkan Imtaq dengan indikator sebagai berikut: *pertama*, unggul dalam pembinaan keagamaan Islam berciri khas Pesantren. *Kedua*, unggul dalam peningkatan prestasi UNAS. *Ketiga,* unggul dalam prestasi Bahasa Arab. Dan *keempat,* unggul dalam prestasi Bahasa Inggris.

 Sedangkan misi madrasah ini adalah pertama, menumbuhkembangkan sikap dan amaliyah keagamaan Islam ala Ahlus Sunnah wal Jama’ah. Kedua, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga setiap siswa dapat berkembang secara optimal, sesuai dengan potensi yang dimiliki. Ketiga, menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh warga Madrasah, baik dalam prestasi akademik maupun non akademik.

 Selain, Madrasah Tsanawiyah Unggulan, SMA Nurul Islam juga mempunyai jumlah guru perempuan yang lebih banyak daripada guru laki-laki, yaitu 13 guru perempuan dan 6 guru laki-laki. Meskipun kepala sekolahnya adalah laki-laki, namun sekolah ini juga peduli terhadap perempuan. Di antaranya terbukti dengan pernah dilaksanakannya seminar tentang kesehatan reproduksi, kegiatan menjahit untuk meningkatkan keahlian siswa perempuan, dan lain-lain. Beberapa guru perempuan juga menduduki jabatan tinggi dalam sekolah ini, antara lain adalah wakil kurikulum, bendahara, staf TU dan pengelola perpustakaan yang masing-masing dipegang oleh guru perempuan.

**3.4 KH. Abdul Hamid Chidlir dan Pemberdayaan Perempuan di Kalangan Pesantren**

 Berbicara mengenai pemberdayaan perempuan di kalangan pesantren memang tepat jika dikaitkan dengan sosok kiai yang satu ini. Gus Hamid yang merupakan panggilan akrab beliau merupakan salah satu kiai yang telah dan sedang berusaha untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan di kalangan pesantren. Ini terbukti dengan misi Madrasah yang dipimpinnya adalah untuk mencetak kiai perempuan dan jenis siswa yang berada di bawah bimbingannya semua adalah perempuan. Melacak latar belakang pendidikan dan lingkungan dari Gus Hamid, sebenarnya beliau dibesarkan dari keluarga yang menganut sitem tradisi budaya sebagaimana keluarga-keluarga yang lain pada saat itu, yaitu perempuan adalah pendamping ibu untuk melakukan pekerjaan rumah, dan laki-laki adalah pendamping ayah untuk melakukan pekerjaan di luar rumah. Demikian juga di sekolah dan pesantren yang dilaluianya, budaya dan tradisi pemberdayaan perempuan belum wujud.

 Meskipun latar belakang keluarga, pendidikan dan lingkungannya yang demikian, kepeduliannya terhadap perempuan telah wujud dalam dirinya sejak muda lagi. Di kalangan teman-teman di sekolah dan pesantrennya, Gus Hamid dikenal debagai ”pembela perempuan” karena beliau sering membela teman-teman dan guru perempuannya yang mendapat musibah ataupun mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya. Beliau juga mengakui bahwa beliau memang sangat peduli kepada kaum perempuan dan anak kecil. Selain itu, dari biografi beliau yang dapat kita baca pada bab sebelumnya, beliau tidak menghalang istri beliau (yang merupakan putri dari pendiri pondok pesantren) untuk berkiprah di luar rumah, bahkan menjadi Ketua Umum Fatayat Cabang Jember selama 3 periode dan menjadi Ketua Umum Muslimat Cabang Jember selama 2 periode. Juga keempat putri beliau telah menempuh pendidikan sampai jenjang master dan doktor. Menurut Drg. Yuliana Mahdiah M.Kes yang merupakan putri kedua beliau, dalam hal pendidikan beliau memang senantiasa mendorong putra dan putrinya untuk menuntut ilmu setinggi mungkin, tanpa membedakan antara putra lelaki dan putri perempuan. Terbukti pada saat ini, dari keempat putri beliau, semuanya telah selesai menempuh jenjang pendidikan master, dan dua diantaranya pada saat ini sedang menempuh pendidikan doktor. Kepedulian beliau terhadap perempuan semakin kuat ketika beliau menjadi menantu KH. Abdul Chalim Shiddiq yang mencetuskan ide ”kiai perempuan” yang kemudian diterapkan dalam pesantren dan madrasah yang didirikannya.

 Kepedulian beliau terhadap perempuan juga didasari oleh hadirnya empat putri dalam kehidupan beliau. Beliau memiliki 4 orang putri dan 2 orang putra. Dengan lebih banyak nya putra perempuan, bagi beliau itu merupakan salah satu tanggung jawab besar untuk menjaga dan mencetak putri-putrinya agar menjadi generasi yang tangguh dan bertanggungjawab. Kehadiran keempat putrinya juga menjadi penambah semangat bagi beliau untuk terus memprjuangkan hak-hak perempuan di mata agama, keluarga dan masyarakat.

Gus Hamid merupakan Ketua Majlis Madrasah Ash-Shiddiqi Putri Jember yang terdiri dari Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah yang kesemuanya adalah siswi perempuan. Madrasah ini merupakan salah satu bagian dari Pondok Pesantren Ash-Shiddiqi Putri yang keduanya saling terkait dan berada dalam satu lokasi yang sama. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pondok pesantren dapat diikuti oleh siswi madrasah, demikian juga sebaliknya. Pembagian pemegang kepemimpinan pesantren dan madrasah ini dilakukan agar masing-masing bidang lebih dapat ditangani secara baik. Dan dipilihnya Gus Hamid sebagai pemimpin Madrasah adalah atas dasar musyawarah keluarga, saran daripada beberapa guru di pesantren dan madrasah, dan secara kebetulan, beliau dan istrilah yang mempunyai latar belakang pendidikan formal di samping juga pendidikan pesantren di antara putra-putra dan menantu KH. Abdul Chalim Shiddiq.

**3.4.1 Perempuan di Mata KH. Abdul Hamid Chidlir**

Sebagaimana diungkapkan di atas bahwa Gus Hamid merupakan sosok yang peduli terhadap perempuan sejak beliau masih muda lagi. Beliau merasa kepeduliannya ini semakin kuat dan merupakan sesuatu yang benar dan perlu dilanjutkan, semenjak beliau berhijrah ke Jember dan diamanatkan Madrasah peninggalan mertuanya. Beliau semakin yakin bahwa konsep pemberdayaan perempuan merupakan konsep yang datang dari agama Islam sendiri dan bukan sebuah penentangan dan pengingkaran terhadap ajaran Islam. Beliau mengakui bahwa tidak mudah untuk melakukan pemberdayaan terhadap perempuan apalagi di kalangan pesantren, karena tradisi masyarakat kita yang belum siap untuk menerima itu.

 Mengenai kedudukan perempuan dalam Islam, beliau berpendapat bahwa sebenarnya kedudukan perempuan adalah mulia, dan bahkan dalam beberapa hal kedudukan perempuan lebih mulia dibandingkan laki-laki. Menurut beliau, hal ini dibuktikan dengan adanya hadith yang berarti *”Surga berada di bawah telapak kaki ibu”* dan juga hadith yang menjelaskan siapakah yang berhak untuk dihormati, Nabi menjawab :”ibumu” sehingga tiga kali yang kemudian baru disusul dengan ”ayahmu”. Kedua hadith ini menunjukkan bahwa kedudukan perempuan dalam Islam adalah mulia dan tidaklah rendah di bawah laki-laki sebagaiman yang dipahami oleh banyak orang. Beliau juga menyinggung ayat al-Qur’an yang menjelaskan bahwa hanyalah ketakwaan yang membedakan laki-laki dan perempuan dihadapan Allah SWT.[[27]](#footnote-27)

 Sementara itu, perempuan di kalangan pesantren yang berada di sekelilingnya, menurut beliau kebanyakannya sudah mulai memahami posisinya sesuai dengan ajaran agama yang sesungguhnya. Terutama para dewan guru yang berada di Madrasah, menurut beliau kebanyakan mereka telah memahami bahwa perempuan merupakan insan yang berhak juga untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi sebagaimana laki-laki. Sedangkan para siswi yang berada di Madrasah, mereka juga sedikit demi sedikit memahami hal ini. Ini karena kebanyakan dari para siswi berasal dari keluarga yang mempunyai latar belakang pendidikan kurang tinggi. Selain itu, tidak dapat dipungkiri bahwa tradisi dan budaya yang berada pada masyarakat kita, khususnya masyarakat desa masih banyak dipengaruhi oleh budaya patriarki. Namun demikian, para siswi yang sudah lama berada di Madrasah ini kebanyaknnya sudah mulai memahami tentang posisinya menurut agama Islam. Terhadap beberapa pihak yang masih belum memahami, Gus Hamid menyatakan bahwa beliau bisa memahami tentang masih adanya kelompok yang menempatkan perempuan sebagai subordinate dan bahkan tidak memiliki bargaining power, karena factor keterbatasan pengalaman dan wawasannya, akibat factor histories dan tradisi lingkungannya.

 Adapun usaha-usaha yang dilakukan beliau untuk meningkatkan pemahaman terhadap posisi perempuan menurut syariat Islam di lingkungan Madrasah adalah dengan cara:

1. Dalam setiap materi pengajian di pondok pesantren dan pelajaran di madrasah, akan diselipkan pemahaman tentang posisi perempan dalam Islam. Hal ini untuk memberikan pengetahuan tentang posisi perempuan yang sebenarnya menurut ajaran Islam dan untuk menghindari kesalahpahaman akibat budaya patriarki yang berada di masyarakat.
2. Memposisikan kaum perempuan pada posisi guru/pengajar, pimpinan lembaga formal (kepala madrasah, jajaran pengurus sebagai policy and decition maker, pengurus OSIS bagi siwi, dll). Dengan demikian, secara tidak langsung para guru dan siswi akan memahami bahwa perempuan juga layak untuk berada pada posisi-posisi tersebut.
3. Mendelegasikan tugas-tugas pesantren kepada kaum perempuan dalam hal hubungan kemasyarakatan, baik tugas-tugas yang terkait dengan instansional maupun institusional/kelembagaan organisasi[[28]](#footnote-28).

 Dari usaha-usaha yang dilakukan di atas, dapat dilhat bahwa beliau memang telah dan sedang melakukan usaha pemahaman posisi perempuan menurut syariat Islam kepada para siswi dan guru yang berada di Madrasah. Usaha yang beliau lakukan ini tidak hanya terbatas pada dataran teoritis saja, namun labih dari itu beliau berusaha langsung merealisasikan dalam wujud praktik dengan memposisikan perempuan dalam posisi yang strategis.[[29]](#footnote-29)

 Selain melakukan usaha untuk memberikan pemahaman tentang posisi perempuan dalam Islam kepada lingkungan Madrasahnya, Gus Hamid juga memandang penting dilakukannya beberapa usaha untuk meningkatkan posisi mereka, tidak lain untuk dapat lebih merealisasikan pemberdayaan terhadap perempuan dan juga peningkatan *bargaining power* pada perempuan. Usaha-usaha itu antara lain adalah dengan cara *pertama*, silaturrahim antar kiai/pengasuh pesantren dan madrasah untuk dapat saling bertukar pikiran dan bermusyawarah untuk memahami posisi perempuan dalam Islam. *Kedua*, silaturrahim antar santri/pelajar (baik dalam bentuk studi banding atau kegiatan lain) antara kalangan yang sudah berwawasan cukup dengan yang belum memahami posisi perempuan sesuai dengan ajaran Islam. Usaha pertama dan kedua ini perlu dilakukan karena Gus Hamid melihat pada realitas yang ada, khususnya di Jember, tidak semua pesantren atau madrasah yang sudah dapat memahami posisi perempuan dan pentingnya pemberdayaan perempuan dilakukan khususnya di lingkungan pesantren. Oleh karena itu, diharapkan dengan melalui silaturrahim dan bermusyawarah antar pengasuh dan juga santri akan dapat menemukan titik temu yang dapat lebih membawa perempuan ke arah yang lebih maju. *Ketiga,* melibatkan unsur perempuan pesantren baik pengasuh maupun santrinya dalam kegiatan training, workshop, sarasehan, dan kegiatan lain yang mengangkat isu perempuan. Hal ini adalah untuk menambah wawasan pesantren terhadap isu tentang perempuan. Dan *keempat,* mendistribusikan informasi tentang gender secara rutin dalam bentuk majalah, buletin, brosur, cd, dan lain-lain.

 Gus Hamid memandang penting dilakukannya usaha-usaha untuk memberikan pemahaman yang benar mengenai posisi perempuan dan pentingnya pemberdayaan perempuan dilakukan, karena menurut beliau, implikasi dari tidak relevannya posisi perempuan ini akan merugikan kaum perempuan sendiri, baik di ranah domestik maupun di ranah publik. Implikasinya di ranah domestik antara lain akan menjadikan derajat perempuan seolah-olah di bawah laki-laki, posisi perempuan (istri) adalah pengabdi kepada lelaki (suami), dan juga perempuan tidak punya hak untuk menuntut kesetaraan dengan laki-laki. Kenyataan ini dalam masyarakat dikenal dengan prinsip bahwa perempuan harus *sam’an wa tho’atan* kepada laki-laki tanpa ada ruang untuk bersuara. Sedangkan implikasinya dalam ranah publik antara lain adalah masih minimnya posisi perempuan dalam aktivitas sosial kemasyarakatan dan adanya diskriminasi pada porsi aktivitas sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, Gus Hamid terus berusaha untuk melibatkan para siswi dan guru di Madrasah untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat. Selain itu, implikasi lainnya adalah kurang adanya kepercayaan akan kemampuan perempuan, baik segi intelektual, leadership maupun skill dalam berbagai bidang.

**3.4.2 Madrasah sebagai Sarana untuk Mencetak ”Kiai Perempuan”**

Terobosan baru tentang ”kiai perempuan” ini sebenarnya telah muncul sejak sekitar tahun 1965-an, yaitu telah dilontarkan oleh *murabby* pesantren dan madrasah ASHRI ini sendiri, KH. Abdul Chalim Shiddiq. Langkah pertama yang beliau lakukan untuk merealisasikan azam beliau ini adalah dengan mendirikan lembaga pendidikan khusus bagi perempuan. Beliau menitikberatkan kepada pendidikan perempuan, karena menurut beliau perempuanlah yang banyak menentukan terhadap pendidikan anak sebagai generasi penerus karena seorang anak selalu berinteraksi secara langsung dengan ibunya sejak dia berada dalam kandungan. Oleh karena itu, pendidikan seorang ibu (=perempuan) sangatlah penting untuk mencetak generasi penerus yang berilmu, beramal, dan berakhlakul karimah.[[30]](#footnote-30) Hal ini juga menunjukkan bahwa konsep pemberdayaan perempuan sebenarnya memang datang dari agama Islam dan bukan datang dari dunia Barat. Menurut keterangan yang saya dapatkan, bahwa pada masa itu, masih sangat jarang bahkan mungkin tidak ada satu asumsi, pemikiran, apalagi sebuah gerakan yang menitikberatkan terhadap pemberdayaan perempuan, apalagi di kalangan pesantren. Namun demikian, KH. Abdul Chalim Shiddiq telah mempunyai ide tentang itu.[[31]](#footnote-31)

Konsep mencetak ”kiai perempuan” yang merupakan salah satu tujuan madrasah ini, bagi saya merupakan salah satu konsep yang luar biasa. Paling tidak, dengan adanya misi mencetak kiai perempuan dapat menggeser pemahaman bahwa kiai adalah milik laki-laki. Selama ini, kiai dalam pemahaman masyarakat adalah mesti laki-laki, sedangkan untuk perempuan biasa disebut dengan istilah ”bunyai”. Namun demikian, konsep bunyai lebih cenderung diberikan kepada perempuan yang menjadi istri dari seorang kiai. Oleh karena gelar itu diberikan atas dasar bergantung kepada pihak lain (karena suaminya kiai), maka tingkat kekharismatikan, kepandaian, dan ke’alimannya berada di bawah kiai itu sendiri. Seseorang ketika diberikan gelar kiai padanya, akan menunjukkan ke’aliman seseorang itu. Berbeda dengan seseorang yang diberi gelar bunyai, maka yang terbesit dalam pikiran masyarakat adalah dia adalah istri seorang kiai yang ke’alimannya belum tentu sebanding dengan kiai itu sendiri. Asumsi seperti ini muncul karena beberapa orang di kalangan kiai mempunyai istri yang tidak dapat dilihat potensi keilmuannya oleh masyarakat (bisa jadi karena tidak mendapat izin dari kiai itu sendiri, dan bisa juga karena memang kurang adanya potensi itu dalam diri seorang bunyai) sehingga ”dianggap” tidak mempunyai kelebihan sebagaimana seorang kiai.

 Untuk meneruskan perjuangan sang pendiri Madrasah, usaha yang dilakukan Gus Hamid untuk merubah asumsi bahwa kiai adalah milik laki-laki terus dilakukannya melalui madrasah yang dibimbingnya. Pertama sekali adalah dengan tetap mempertahankan dari keseluruhan jumlah siswanya yang berjenis perempuan. Ini menunjukkan bahwa beliau memang ingin dengan serius mencetak kader-kader kiai perempuan. Selain itu, dari jumlah tenaga struktural dan fungsional Madrasah Ashri keseluruhannya adalah 35 orang, hanya 12 di antaranya adalah laki-laki, dan selebihnya adalah perempuan. Dari jumlah tersebut, dengan perincian untuk Madrasah Tsanawiyah, dari seluruh jumlah guru sebanyak 22 orang, hanya 6 di antaranya yang berjenis laki-laki, dan 16 selebihnya adalah perempuan. Sedangkan untuk Madrasah Aliyah, dari 27 jumlah guru keseluruhannya, hanya 10 orang laki-laki dan 17 orang perempuan. Nampak di sini bahwa kaum perempuan mendominasi daripada laki-laki. Dan data menunjukkan bahwa guru laki-laki yang ada di Madrasah ini hampir keseluruhannya merupakan Guru Pemilik dan Guru Pendiri.[[32]](#footnote-32)

 Alasan mengapa lebih banyak jumlah guru perempuan dibanding guru laki-laki, Gus Hamid menjelaskan bahwa hal ini dilakukan atas dasar:

1. Karena untuk lebih mematuhi syariat agama bahwa perempuan tidak boleh bertemu selain muhrimnya kecuali hal-hal yang diperlukan. Dengan sedikitnya guru laki-laki akan lebih meminimalkan keadaan tersebut.
2. Sesuai dengan misi pesantren yang ingin mencetak kiai perempuan, maka usaha yang dilakukan tidak terbatas kepada pendidikan dan pengkaderan kepada para siswi, namun juga kepada para guru. Oleh karena itu, para guru diambil dari kaum perempuan dengan harapan agar lebih memaksimalkan potensi yang ada kepada kaum perempuan.[[33]](#footnote-33)
3. Karena siswanya adalah perempuan, maka akan lebih komunikatif kalau gurunya adalah perempuan juga. Dengan demikian diharapkan para guru akan lebih memahami keadaan dan konsisi para siswinya yang juga perempuan.
4. Gus Hamid percaya bahwa populasi perempuan di dunia saat ini dan masa akan datang akan lebih banyak jumlah perempuannya daripada laki-laki. Oleh karena itu, maka beliau berazam dari madrasah yang dibimbingnya akan muncul para ahli di segala bidang (guru, insinyur, arsitek, direktur, ekonom, dan lain-lain) dari kalangan perempuan. Beliau ingin membuktikan bahwa para ahli diberbagai bidang yang selama ini dipercaya adalah milik kaum laki-laki juga dapat dimiliki oleh kaum perempuan.

 Selain itu, penempatan guru perempuan pada posisi yang strategis juga telah dilakukan oleh Gus Hamid. Ini terbukti dari Kepala Madrasah Aliyah ASHRI yang dipegang oleh guru perempuan, yaitu Dra. Cred Dien Dj. Demikian juga wakil kurikiulum, wakil kesiswaan dan wali kelas masing-masing kelas Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah kesemuanya dipegang oleh guru perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa Gus Hamid telah berusaha untuk melakukan pemberdayaan perempuan dikalangan madrasah yang dipimpinnya. Sedangkan untuk kurikulum pelajaran yang diterapkan di madrasah ini, selain mata pelajaran yang telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan serta Departemen Agama, madrasah ini juga menerapkan beberapa mata pelajaran keahlian, antara lain adalah tartil al-Qur’an, tata boga, tata busana, tata rias, aswaja dan akhlaq. Penambahan mata pelajaran ini dilakukan untuk lebih meningkatkan *skil*l/keahlian para siswi agar nantinya dapat diterapkan dalam masyarakat ketika mereka sudah kembali ke masyarakat.

 Menurut Dra. Cred Dien berkaitan dengan posisi beliau sebagai Kepala Sekolah Madrasah Ashri, beliau menganggap bahwa perempuan apabila diberi kesempatan yang sama dengan laki-laki, perempuan pun dapat berkarya dan berprestasi. Beliau bersyukur karena sejak kecil telah dididik oleh kedua orang tuanya dengan tidak membedakan antara anak laki-laki dan perempuan. Laki-laki berada di dapur, misalnya, adalah sesuatu yang biasa di kalangan keluarga beliau. Pada awal kiprahnya di Madrasah ASHRI pada tahun 1984, beliau merasa “prihatin” dengan kondisi Madrasah yang pada saat itu masih kurang disiplin. Namun beliau terus berazam untuk berjuang dalam Madrasah bersama dengan guru-guru yang lain, dan beliau sangat bersyukur dan puas dengan kemajuan yang telah dicapai oleh Madrasah sampai saat ini. Beliau juga berpendapat bahwa pemberdayaan perempuan memang sudah seharusnya dilaksanakan karena memang perempuan mempunyai hak untuk berprestasi sebagaimana laki-laki[[34]](#footnote-34).

 Sedangkan menurut guru tata busana, Zahira Najmin Nida menyatakan bahwa beliau merasa bangga dapat berbagi ilmu tata busana dengan para siswi di Madrasah ASHRI. Menurutnya, mata pelajaran tata busana, tata boga dan tata rias memang sangat diperlukan oleh para siswi karena untuk bekal nanti ketika para siswi sudah kembali ke masyarakat. Dan menurut beliau, adanya pelajaran tersebut merupakan salah satu bentuk nyata usaha Madrasah untuk melaksanakan pemberdayaan terhadap perempuan, baik di kalangan para siswi maupun guru[[35]](#footnote-35).

 Demikian bagaimana sosok Gus Hamid yang berusaha keras untuk memperjuangkan hak-hak perempuan di pesantren melalui madrasah yang dikelolanya. Dan tidak berhenti sampai di sini, Gus Hamid saat ini sedang dalam proses pendirian pondok pesantren khusus perempuan bagi mahasiswa yang rencananya akan dibangun di kawasan Tegal Besar. Semoga perjuangan beliau senantiasa mendapat bantuan dan lindungan Allah SWT sehinggan cita-cita beliau untuk memperjuangkan hak-hak perempuan khususnya di lingkungan pesantren dapat terwujud.

**BAB IV**

**KESIMPULAN**

 Dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Posisi sosial kiai di lingkungan pesantren di kota Jember masih dapat dinilai besar karena kiai masih mempunyai pengaruh yang kuat terhadap para santri dan masyarakat yang ada di sekitarnya.
2. Peran kiai terhadap pemberdayaan perempuan di Jember sangat besar karena para kiai lah yang menentukan kurikulum dan kegiatan yang dilaksanakan di pesantren yang diasuhnya. Pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh kiai di Jember berbeda-beda. KH. Muhyiddin Abdusshomad melaksanakan pemberdayaan perempuan di pesantrennya dengan cara melaksanakan beberapa seminar dan workshop tentang perempuan di pesantrennya dengan bekerja sama dengan LSM-LSM yang berkaitan. Selain itu, juga dengan cara menerbitkan buku kurikulum pendidikan agama Islam yang ramah terhadap perempuan. Sedangkan KH. Drs. Abdul Hamid Chidlir melaksanakan pemberdayaan perempuan di madrasahnya dengan cara lebih pada praktek, yaitu meletakkan para guru perempuan pada posisi-posisi yang strategis, dan memasukkan pendidikan tata busana, tata boga, dan tata rias dalam kurikulum pembelajaran sebagai bekal perempuan untuk berkiprah dalam masyarakat. Juga dengan mengadakan Praktek Kerja Lapangan kepada para siswi yang akan lulus, yaitu kegiatan terjun ke masyarakat secara langsung dengan meletakkan para siswi sebagai pembina masyarakat secara langsung.
3. Adapun strategi yang dilakukan oleh KH. Muhyiddin Abdusshomad dalam usaha melaksanakan pemberdayaan perempuan di lingkungan pesantren adalah dengan cara pendekatan kepada para kiai sepuh untuk dapat bersama mewujudkan pemberdayaan perempuan di lingkungan pesantren. Sedangkan strategi KH.Drs. Abdul Hamid Chidlir dalam mewujudkan pemberdayaan perempuan di kalangan pesantren adalah dengan cara silaturrahim antar Kiai/Pengasuh pondok pesantren untuk saling tukar pikiran/musyawarah guna memahami posisi perempuan, silaturrahim antar santri/pelajar (dalam bentuk studi banding, dan lain-lain) di antara kalangan yang sudah berwawasan cukup dengan yang belum memahami posisi perempuan sesuai Islam, melibatkan unsur perempuan pesantren baik pengasuh maupun santrinya dalam kegiatan training, workshop, sarasehan, dll yang mengangkat isu perempuan, dan mendistribusikan informasi tentang gender secara rutin baik majalah, bulletin, brosur, cd, dan lain-lain.
4. Implikasi peran kiai terhadap kehidupan sosial perempuan di ranah domestik dan ranah publik sangat besar. Implikasi dari tidak relevannya posisi perempuan ini di ranah domestic antara lain adalah derajat perempuan ”seolah-olah”di bawah laki-laki, perempuan (istri) adalah pengabdi laki-laki (suami), perempuan tidak punya hak untuk menuntut kesamaan dengan laki-laki dan berprinsip harus *sam’an wa to’atan.* Sedangkan Implikasi dari tidak relevannya posisi perempuan ini di ranah public antara lain adalah minimnya posis perempuan dalam aktivitas sosial kemasyarakatan, kurang adanya kepercayaan akan kemampuan perempuan, baik segi intelektual, leadership maupun skill, dan adanya diskriminasi pada porsi aktivitas sosial kemasyarakatan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdullah Syukri Zarkasy. 1999. Pondok Pesantren sebagai Alternatif Kelembagaan Pendidikan untuk Program Pengembangan Studi Islam di Asia Tenggara. Dalam Zainuddin Fananie dan M. Thoyibi (peny.). *Studi Islam Asia Tenggara.* Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Abdul Halim Abu Syuqqah. 1989. *Tahrir al-mar'ah fi al-ashr al-risalah*. Juz.IV. Mesir: Dar al-Qalam li al-Nashr wa al-Tauzi'.

Abdurrahman Wahid. 1999. Pondok Pesantren Masa Depan. Dlm. Said Agil Siradj, *Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren.* Bandung: Pustaka Hidayah.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. 1988. Pesantren sebagai Sub Kultur. Dalam Dawam Rahardjo (ed.). *Pesantren dan Pembaharuan*. Jakarta: LP3ES.

Abu al-A'la al-Maududi. 1985. *al-Hijab*. Jeddah: al-Dar al-Saudiyyah li al-Nashr wa al-Tauzi'.

Abu Dawud Sulaiman bin al-'Ash'ath al-Sijistani. 1999. *Sunan Abi Dawud*. Jld.II. Kaherah: Dar al-Hadith.

Abu al-Falah Abd al-Hayy Ibn al-'Imad al-Hanbali. T.th. *Shajarat al-dahab fi akhbari man dahab*. Beirut: Mansurat Dar al-Afaq al-Jadidah.

Abu Hayyan. 1978. *Tafsir al-bahr al-muhith*. Jld.VII. Beirut: Dar al-Fikr.

Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qushairi al-Naisaburi. T.th. *al-Jami' al-sahih*. Jld.IX. Beirut: Dar al-Fikr.

Abu al-Hussain Ahmad bin Faris bin Zakariya al-Lughawi. 1986. *Mujmal al-lughah.* Beirut: Muassasah al-Risalah.

Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah. 1999. *Sunan al-Tirmizi*. Jld.III. Kaherah: Dar al-Hadith.

Ahmad Janan Asifudin. 1994. Pondok Pesantren dalam Perjalanan Sejarah. Dlm. *Al-Jami’ah.* No.55.

Ali Haidar. 1994. *Nahdhatul Ulama dan Islam di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

Ali Hasjmy. 1975. *Pendidikan Islam di Aceh dalam Perjalanan Sejarah.* Aceh: Sinar Darussalam.

Alisson Jaggar. 1983. *Feminist politics and human nature*. London: Harverster.

Asghar Ali Engineer. 2003. *Matinya perempuan transformasi al-Qur'an, Perempuan dan masyarakat modern*. Terj. Akhmad Affandi & Muh. Ihsan. Yogyakarta: IRCiSoD.

Atho Mudhzar. 1981. *Religious Education and Politics in Indonesia (A Preminilary Study of Islamic Education and Politics, 1966-1979.* Tesis University of Queensland.

Azyumardi Azra. 1999. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju* Milenium Baru. Jakarta: PT. Logos.

Azyumardi Azra dan Saiful Umam (ed.). 1998. *Tokoh dan Pemimpin Agama: Biografi Sosial-Intelektual.* Jakarta: Badan Litbang Agama Departemen Agama RI dan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat.

Badran, Margot. 1995. *Feminist, Islam and nation*. Princeton: Princeton University Press.

Benda, Harry J. 1980. *Contitunity and Change in Indonesian Islam, Asian and African Studies.* The Hague: Van Hoeve.

Bisri Effendi. 1990. *An-Nuqoyyah: Gerak Transformasi Sosial di Madura*. Jakarta: P3M.

Dhofier, Zamakhsyari. 1980. ”The Pesantren Tradition: A Studi of the Role of the Kyai in the Maintenance of the Traditional Ideology of Islam in Java”. *Disertasi* doktor, ANU Canberra.

\_\_\_\_\_. 1982. *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai.* Jakarta: LP3ES.

\_\_\_\_\_. 1992. Sekolah Al-Qur’an dan Pendidikan Islam di Indonesia dalam *Ulumul Qur’an*. Vol.III. No.4.

Endang Sumiarni. 2004. *Jender dan feminisme*. Yogyakarta: Jalasutra.

Endang Turmudi. 2003. Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.

Evelyn Red. 1993. *Women's evolusion*. New York: Pathfinder.

Geertz, Clifford. 1959. “The Javanese Kyai: The Changing Role of Cultural Broker”, dalam Comparative Studies

C.C. Berg, “Indonesia”. Dlm. H.A.R. (ed.). 1932. *Whither Islam? A Survey of Modem Movement in the Muslim World.* London: Victor Gollancz & Ltd.

Gilsenen, Michael. 1973. *Saint and Sufi in Modern Egipt: En Essay in the Sociology of Religion.* Oxford Monograph on Social Anthropology.

Greg Barton. 2002. *Biografi Gus Dur; The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid.* Lie Hua (pntrjm.). Yogyakarta: LKiS.

Hadimulyo. 1985. Dua Pesantren Dua Wajah Budaya. Dalam Dawam Rahardjo (ed.). *Pergulatan Dunia Pesantren, Membangun dari Bawah*. Jakarta: P3M.

Hodgson, Marshal GS. 1974. *The Venture of Islam: Consciense and History in a World Civilization,* vol. 1 dan 2. Chicago: University of Chicago Pers.

Horikoshi, Hiroko. 1976. “A Traditional Leader in a Time of Change: The Kyai and Ulama in West Java”. *Disertasi* Doktor. University of Illionis.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. 1987. *Kiai dan Perubahan Sosial (Terj.).* Jakarta: P3M.

Howard M. Federspiel. 1999. Muslim Intellectuals in Southeast Asia. *Studi Islamika*. Vol. 6. No. 1

Hubies. Aida Fitalaya. 1997. "Feminisme dan pemberdayaan perempuan" dalam *Membincangkan Feminisme*. Bandung: Pustaka Hidayah.

Husein Muhammad. 2004. *Islam Agama Ramah Perempuan; Pembelaan Kiai Pesantren.* Yogyakarta: LKiS.

Imron Arifin. 1992. *Kepemimpinan Kiai: Kasus Pondok Pesantren Tebuireng.* Malang: Kalimasada Press.

Iqbal Barakah. 2000. *al-Mar'ah al-muslimah fi al-shira' al-tarbush wa al-qa'bah.* Kairo: Maktabah Usrah.

Kamaruzzaman Bustaman - Ahmad. 2002. *Islam Historis: Dinamika Studi Islam di Indonesia.* Yogyakarta: Galang Press.

Kuntowijoyo. 1991. *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi*. Bandung: Mizan.

Lathiful Khuluq. 2000. *Fajar Kebangunan Ulama: Biografi K.H.Hasyim Asy’ari.* Yogyakarta: LKiS.

Mahmud Yunus. 1996. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia.* Jakarta: Hidakarya Agung.

M. Chatuverdi dan Tiwari B.N. 1970. *A Practical Hindi-English Dictionary.* Delhi: Rashtra Printers.

M. Hasbi Amiruddin. 1994. *The Response of the Ulama Dayah to the Modernization of Islamic Law.* Tesis Institute of Islamic Studies McGill University.

Mansour Fakih. 1996. *Analisis gender & transformasi sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mansour Fakih. 1996. *Posisi kaum perempuan dalam Islam: Tinjauan dari analisis gender.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mansur Noor, Arifin. 1990. *Islam in an Indonesian Word: Ulama of Madura.* Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Martin Van Bruinessen. 1992. Pesantren dan Kitab Kuning: Pemeliharaan dan Kesinambungan Tradisi Pesantren. *Ulumul Qur’an*. Vol.III.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. 1999. *Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan.

Muhammad Anas Qasim Ja'far. T.th. *al-Huquq al-siyasiyah li al-mar'ah fi al-Islam wa al-fikr wa al-tasyri'.* Kairo: Dar al-Nahdah al-Arabiyah.

Muhammad al-Baltaji. 2000. *Makanat al-mar'ah fi al-Qur'an al-karim wa al-sunnah.* Kairo: Dar al-Salam.

Muhammad Mahmud Jamaludin. 2001. *al-Mar'ah al-muslimah fi al-ashri al-aulamah*. Mesir: Dar al-Kitab al-Mashri.

Naila Kabeer. 1991. The Quest for National Identity: Women, Islam and the State in Bangladesh. Dalam Deniz Kandiyoti (ed.), *Women, Islam and the State.* Philadelphia: Temple University Press.

Nasaruddin Umar. 1999. *Argumen kesetaraan jender perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.

Nefzawi, Sheikh. 1964. *The Perfumed Garden*. Terj. Richard Burton. New York.

Nunuk Prasetyo Murniati. 1996. *Pengaruh agama terhadap ideologi gender dalam dinamika gerakan perempuan Indonesia.* Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.

Pradjarta Dirdjosanjoto. 1999. *Memelihara Umat; Kiai Pesantren – Kiai Langgar di Jawa*. Yogyakarta: LKiS.

*Profil Madrasah Aliyah ASHRI Tahun Pelajaran 2010/2011*. 2010

*Profil Madrasah Tsanawiyah ASHRI Tahun Pelajaran 2010/2011*. 2010.

*Program Kerja Madrasah ASHRI Jember Tahun 2010/2011.*

Sukamto. 1999. *Kepemimpinan Kiai dalam Pesantren.* Jakarta: Pustaka LP3ES.

Suteja. 1999. Pola Pemikiran Kaum Santri: Mengaca Budaya Wali Jawa. Dlm. Said Agil Siradj. *Pesantren Masa Depan*: *Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren.* Bandung: Pustaka Hidayah.

Syafiq Hasyim (et.al). 1999. Gerakan perempuan dalam Islam: Perspektif kesejarahan kontemporer. dalam *Tashwirul Afkar*. Edisi No. 5.

Tim Penyusun. 1984. *Standarisasi Sarana Pondok Pesantren*. Jakarta: Proyek Pembinaan Bantuan kepada Pondok Pesantren Direktoral Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag RI.

Teuku Ibrahim Alfian. 1999. *Wajah Aceh dalam Lintasan Sejarah.* Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh.

Turmudi, Endang. 2003. *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan.* Yogyakarta: LkiS.

Yunahar Ilyas. 2006. *Kesetaraan Gender dalam Al-Qur’an; Studi Pemikiran Para Mufasir*. Yogyakarta: LABDA Press.

Wawancara:

* KH. Muhyiddin Abdusshomad
* Ustadz Afif
* Ustadzah Ana Safitri
* KH. Drs. Abdul Hamid Chidlir
* Dra. Cred Dien
* Husni, S.Pd.I
* Zahira Najmin Nida
1. Lihat di [www.wikipwdia.org.id](http://www.wikipwdia.org.id) (4 September 2018) [↑](#footnote-ref-1)
2. C.C. Berg, “Indonesia”, dalam H.A.R. (ed.). 1932. *Whither Islam? A Survey of Modem Movement in the Muslim World.* London: Victor Gollancz & Ltd. Pendapat ini kemudian dikutip dalam M. Hasbi Amiruddin. 1994. *The Response of the Ulama Dayah to the Modernization of Islamic Law.* Tesis Institute of Islamic Studies McGill University, dan juga Zamakhsyari Dhofier (1994): 18. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ali Hasjmy adalah tokoh ulama Aceh yang terkenal. Untuk biografinya, baca Aslam Noor: Prof. H. Ali Hasjmi: Pemadam Api DI/TII. Dalam Azyumardi Azra dan Saiful Umam (ed.). 1998. *Tokoh dan Pemimpin Agama: Biografi Sosial-Intelektual.* Jakarta: Badan Litbang Agama Departemen Agama RI dan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat. Hlm: 357-380. [↑](#footnote-ref-3)
4. Penting dicatat bahwa Raden Fatah, putra Brawijaya Majapahit adalah santri perguruan Islam di Ampel Denta. Mengenai sejarah Ampel Denta, baca Teuku Ibrahim Alfian. 1999. *Wajah Aceh dalam Lintasan Sejarah.* Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh. [↑](#footnote-ref-4)
5. Keterangan lengkap mengenai unsur-unsur pesantren di atas dapat dilihat dalam Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, hlm. 44-60; Martin, *Kitab Kuning*, hlm. 112-171; Suteja, Pola Pemikiran Kaum Santri: Mengaca Budaya Wali Jawa, dalam Said Agil Siradj, *Pesantren Masa Depan*, hlm. 83; Lathiful Khuluq, *Fajar Kebangunan Ulama: Biografi K.H.Hasyim Asy’ari,* hlm. 29-40; Ahmad Janan Asifudin, Pondok Pesantren dalam Perjalanan Sejarah. Dlm. *Al-Jami’ah.* No.55 hlm. 54. [↑](#footnote-ref-5)
6. Lihat misalnya, Abdurrahman Wahid. 1999. Pondok Pesantren Masa Depan dalam Said Agil Siradj, *Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren.* Bandung: Pustaka Hidayah. Hlm.13-24. [↑](#footnote-ref-6)
7. Mengenai perkembangan pesantren, lihat Atho Mudhzar. 1981. Religious Education and Politics in Indonesia (A Preminilary Study of Islamic Education and Politics, 1966-1979): 36-41 dan Zamakhsyari Dhofier. 1992. Sekolah Al-Qur’an dan Pendidikan Islam di Indonesia dalam Ulumul Qur’an. Vol.III no.4 hlm. 88-90 [↑](#footnote-ref-7)
8. KH.Muhyiddin Abdusshomad Sosok Kiai Panutan, dalam [www.nuonline.com](http://www.nuonline.com) (25 September 2018) [↑](#footnote-ref-8)
9. Kiprah KH.Muhyiddin Abdusshomad dalam Masyarakat dalam [www.nuonline.com](http://www.nuonline.com) (25 September 2018) [↑](#footnote-ref-9)
10. Buku Panduan Pondok Pesantren NURIS yang tidak di terbitkan. [↑](#footnote-ref-10)
11. Wawancara dengan salah satu tenaga pengajar di NURIS, Ustadzah Ana Safitri pada 12 Oktober 2018 [↑](#footnote-ref-11)
12. Wawancara dengan salah satu tenaga pengajar di NURIS, Ust. Afif pada 13 Oktober 2018 [↑](#footnote-ref-12)
13. Sementara itu, Abdullah Syukri Zarkasy (1999: 349) membagi pesantren ke dalam 3 kelompok, yaitu (1) pesantren yang mempertahankan dan mengabadikan tradisi semulanya dan tidak berusaha untuk menyesuaikan diri atau menerima perkembangan dan perubahan zaman, (2) pesantren yang masih mempertahankan system tradisi ilmiahnya, namun juga mengadopsi sistem pendidikan umum seperti kurikulum Depag dan Dikbud ke dalam pesantren di samping pengajian kitab yang masih ada di luar jam-jam sekolah santri, dan (3) pesantren yang memodernisasi sistem kelembagaannya dan merombak materi kurikulum beserta sistem pengajarannya secara integral. [↑](#footnote-ref-13)
14. Wawancara dengan Gus Hamid pada 15 Oktober 2018 [↑](#footnote-ref-14)
15. ibid [↑](#footnote-ref-15)
16. Buku Panduan Madrasah ASHRI Jember yang tidak diterbitkan [↑](#footnote-ref-16)
17. Wawancara dengan salah satu tenaga pengajar di Madrasah, ibu Cred Dien pada 15 Oktober 2018 [↑](#footnote-ref-17)
18. Buku Panduan Madrasah ASHRI yang tidak diterbitkan [↑](#footnote-ref-18)
19. Abdurrahman Wahid memberikan contoh Gerakan Sarvodaya di Sri Lanka yang melakukan emansipasi nasib manusia melalui upaya kolektif dengan motivasi keagamaan untuk mengubah pola kehidupan yang telah sekian lama mendera nasib mereka yang berada di lapisan terbawah kehidupan masyarakat. [↑](#footnote-ref-19)
20. Jika diteliti secara cermat penggunaan kata *nafs* yang terulang 295 kali dalam berbagai bentuknya dalam al-Qur'an, tidak satupun dengan tegas menunjuk kepada Adam. Kata *nafs* kadang-kadang berarti "jiwa" (Q.S. al-Ma'idah[5]:32), "nafsu" (Q.S. al-Fajr[89]:27), "nyawa/roh" (Q.S. al-'Ankabut[29]:57). Kata *al-nafs* *al-wahidah* sebagai "asal-usul kejadian" terulang lima kali tetapi itu semua tidak mesti berarti Adam, karena pada ayat lain, seperti Q.S. al-Syu'ra[42]:1,  *nafs* itu juga menjadi asal-usul binatang. [↑](#footnote-ref-20)
21. Dikutip dari buku Asghar Ali Engineer, *The Right of Women in Islam.* [↑](#footnote-ref-21)
22. Lihat juga ayat-ayat lain yang mendukung pandangan bahwa kaum perempuan tidaklah subordinasi terhadap kaum laki-laki, seperti surat at-Taubah [9] ayat 71, surat an-Nisa [4] ayat 123, surat Ali Imran [3] ayat 195, dan surat an-Nahl [16] ayat 97. [↑](#footnote-ref-22)
23. Menurut Nasaruddin Umar, pada perkembangan saat ini beberapa kiai sudah mulai mengalami “penurunan kepercayaan” dari masyarakat dikarenakan banyak dikalangan kiai pada saat ini sudah mulai terjun ke dunia politik, dunia bisnis, dan lain-lain sehingga menyebabkan kurangnya perhatian dan konsentrasinya untuk membina masyarakat sebagaiman kiai-kiai terdahulu. Namun demikian, hal ini tidak cukup mewakili keseluruhan kiai di Indonesia karena di beberapa daerah khususnya di Jawa Timur masih banyak kiai yang masih mempunyai pengaruh besar terhadap perubahan masyarakat di sekitarnya (23 Oktober 2018). [↑](#footnote-ref-23)
24. Wawancara dengan KH.Muhyiddin Abdusshomad 23 Oktober 2019 [↑](#footnote-ref-24)
25. Kekerasan dalam Rumah Tangga? Dalam [www.swararahima.com](http://www.swararahima.com) (12 November 2019) [↑](#footnote-ref-25)
26. Kepeloporan Perempuan Pesantren dalam [www.swararahima.com](http://www.swararahima.com) (12 November 2019) [↑](#footnote-ref-26)
27. Wawancara dengan KH.Drs.Abdul Hamid Chidir pada 1 November 2019 [↑](#footnote-ref-27)
28. idem [↑](#footnote-ref-28)
29. Lihat sub bab selanjutnya yang menjelaskan tentang Madrasah dan peran kaum perempuan di dalamnya. [↑](#footnote-ref-29)
30. Keterangan ini diperoleh dari para putra dan menantu beliau yang pada saat ini meneruskan perjuangan beliau, antara lain Hj. Faiqotul Himmah dan KH. Syauqi AS, dan KH. Drs.Abdul Hamid Chidlir sendiri. [↑](#footnote-ref-30)
31. Wawancara dengan Nyai Faiqotul Himmah, istri gus Hamid sebagai salah saatu putri dari KH.Abdul Chalim Shiddiq sang pendiri Pondok Pesantren ASHRI (5 November 2019) [↑](#footnote-ref-31)
32. Untuk keterangan tentang Guru Pemilik dan Guru Pendiri dapat dilhiat pada Bab ke-2. [↑](#footnote-ref-32)
33. Berkaitan dengan hal ini, Gus Hamid juga menyinggung mengenai konsep “*kulaan dan jualan*” (*kulaan* adalah dalam Bahasa Jawa yang berarti membeli sesuatu barang untuk kemudian dijual lagi) yang ingin beliau terapkan kepada kaum perempuan. Menurut beliau, untuk menjadi manusia yang berilmu dan beramal, tidak saja diperlukan “*kulaan*” ilmu dengan belajar dan menuntut ilmu setinggi mungkin. Lebih dari itu, selain *kulaan* diperlukan juga jualan, yaitu mengajar. Dengan mengajar seseorang secara langsung dan tidak langsung akan juga belajar dan menambah ilmu, karena dengan mengajar akan mendapatkan ilmu baru yang belum didapatkan ketika belajar (wawancara 5 November 2019). [↑](#footnote-ref-33)
34. Wawancara pada 5 November 2019 [↑](#footnote-ref-34)
35. Wawancara pada 5 November 2019 [↑](#footnote-ref-35)